



PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA

BUKU AJAR

Psikologi Forensik

School of Psychology
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

PENULIS

STEFANI VIRLIA

JESSICA CHRISTINA WIDHIGDO

CITA TRI KUSUMA



BUKU AJAR

Psikologi Forensik

School of Psychology
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

PENULIS

STEFANI VIRLIA
JESSICA CHRISTINA WIDHIGDO
CITA TRI KUSUMA



PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA



BUKU AJAR PSIKOLOGI FORENSIK

ISBN:

Penulis:

Stefani Virlia, Jessica Christina Widhigdo, Cita Tri Kusuma

Ilustrator:

Nabilla Putri Rahmawati

Ukuran:

Jumlah halaman: 124 halaman, **Ukuran:** 17.5 x 25 cm

Hak Cipta © 2026 – Pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, menerbitkan kembali, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Penerbit Universitas Ciputra, kecuali kutipan untuk keperluan akademis, referensi, publikasi, atau kebutuhan non-komersial dengan jumlah tidak lebih dari satu bab.

Mohon untuk menyebutkan Penerbit Universitas Ciputra jika mengutip materi di dalamnya. Foto serta ilustrasi gambar yang berada dalam buku ini dibuat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tanpa ada maksud untuk melanggar atau merendahkan norma, budaya, aturan, nilai, serta kode etik yang berlaku di Indonesia.

PENERBIT UNIVERSITAS CIPUTRA

Penerbit Universitas Ciputra
CitraLand CBD Boulevard, Kel. Made, Kec. Sambikerep
Surabaya, Jawa Timur, 60219
Email: penerbit@ciputra.ac.id

KATA PENGANTAR

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks hukum dan sistem peradilan. Bidang ini menghubungkan konsep-konsep psikologi dengan praktik hukum untuk membantu memahami perilaku kriminal, proses investigasi, serta berbagai dinamika psikologis yang muncul dalam proses penegakan hukum. Melalui pendekatan psikologis, berbagai aspek seperti motivasi kejahatan, kondisi mental pelaku, serta pengalaman korban dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Secara garis besar, buku ini terdiri dari empat bab utama. Bab pertama membahas pengantar psikologi forensik yang meliputi sejarah dan perkembangan psikologi forensik, peran psikologi kriminalitas, serta pembahasan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Bab kedua membahas metode investigasi dalam konteks psikologi forensik, termasuk prinsip dan etika wawancara investigasi, teknik wawancara terhadap pelaku, serta teknik wawancara terhadap korban. Bab ketiga mengulas mengenai profil kejahatan (*criminal profiling*), yang mencakup konsep dasar profil pelaku kejahatan, metode dalam menyusun profil kriminal, serta berbagai penerapan profil kejahatan dalam proses investigasi dan penegakan hukum. Bab keempat membahas penerapan psikologi forensik dalam praktik, termasuk peran psikolog di pengadilan, proses asesmen psikologi forensik, serta intervensi dan etika dalam praktik psikologi forensik.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan pembelajaran yang mendorong keterlibatan aktif pembaca melalui refleksi, analisis kasus, serta diskusi. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu melihat penerapannya dalam situasi nyata. Buku ini disusun sebagai bahan ajar untuk mata kuliah Psikologi Forensik dan diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa psikologi maupun pembaca yang tertarik mempelajari hubungan antara psikologi dan sistem hukum. Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ajar ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur pembelajaran psikologi forensik serta meningkatkan pemahaman pembaca mengenai pentingnya perspektif psikologis dalam sistem peradilan.

Selamat membaca!

Surabaya, Maret 2026

—*Penulis*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	IX
BAB I PENGANTAR PSIKOLOGI FORENSIK.....	1
1.1 DEFINISI PSIKOLOGI FORENSIK	2
1.2 KONSEP DASAR PSIKOLOGI FORENSIK	6
1.3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PSIKOLOGI FORENSIK.....	7
1.4 PSIKOLOGI FORENSIK VS PSIKOLOGI KLINIS	8
1.5 PSIKOLOGI FORENSIK DAN DISIPLIN ILMU YANG LAIN	12
1.6 SISTEM LEGAL DAN KAITANNYA DENGAN PSIKOLOGI FORENSIK	15
1.7 PERAN PSIKOLOG FORENSIK DALAM KONTEKS HUKUM	16
1.8 RANGKUMAN	17
1.9 BAHAN DISKUSI	19
1.10 FEEDBACK.....	19
1.11 REFLEKSI	21
1.12 ASESMEN: KUIS.....	21
1.13 RUBRIK.....	24
BAB II TEORI PSIKOLOGI KRIMINALITAS DAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM	25
2.1 DEFINISI PERILAKU KRIMINAL	26
2.2 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERILAKU KRIMINAL	27
2.3 GANGGUAN KESEHATAN MENTAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU KRIMINAL.....	29
2.4 TIPOLOGI KEJAHATAN	34
2.5 RANGKUMAN	37
2.6 BAHAN DISKUSI	38
2.7 FEEDBACK	38
2.8 REFLEKSI.....	39

2.9 ASESMEN.....	40
2.10 RUBRIK.....	43
BAB III METODE INVESTIGASI.....	44
3.1 DEFINISI INVESTIGASI DAN INTEROGASI.....	45
3.2 METODE INVESTIGASI.....	47
3.3 SEJARAH INVESTIGASI KEPOLISIAN INDONESIA.....	48
3.4 WAWANCARA INVESTIGASI.....	49
3.5 WAWANCARA KOGNITIF.....	51
3.6 TEKNIK WAWANCARA INVESTIGASI SAKSI & TERSANGKA.....	57
3.7 KEBUTUHAN TERDAKWA/PELAKU TINDAKAN KRIMINAL.....	60
3.8 PELANGGARAN ETIKA DALAM INVESTIGASI TERPERIKSA.....	61
3.9 KETERAMPILAN INTERVIEWER.....	63
3.10 WAWANCARA DAN OBSERVASI.....	65
3.11 METODE <i>CONVERSATION MANAGEMENT (CM)</i>	69
3.12 RANGKUMAN.....	81
3.13 BAHAN DISKUSI.....	84
3.14 FEEDBACK.....	84
3.15 REFLEKSI.....	86
3.16 ASESMEN: ROLEPLAY WAWANCARA INVESTIGASI.....	87
3.17 RUBRIK.....	89
BAB IV CRIMINAL PROFILING.....	90
4.1 DEFINISI <i>CRIMINAL PROFILING</i>	91
4.2 TAHAPAN DALAM CRIMINAL PROFILING.....	94
4.3 RANGKUMAN.....	109
4.4 BAHAN DISKUSI.....	109
4.5 FEEDBACK.....	110
4.6 REFLEKSI.....	111
4.7 ASESMEN: LAPORAN STUDI KASUS DAN VIDEO PENJELASAN.....	112
4.8 RUBRIK.....	114
PROFIL PENULIS.....	115

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Perbedaan Psikologi Forensik dan Psikologi Klinis</i>	10
Tabel 2. Perbedaan Interogasi dan Wawancara.....	46
Tabel 3. Premediated vs Impulsif.....	102
Tabel 4. Informasi Criminal Profile.....	105
Tabel 5. Perbandingan Tahap-Tahap dan Rekonstruksi TKP.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Peradilan	3
Gambar 2. Perilaku Kriminal	26
Gambar 3. Ketidakseimbangan Neurotrnsmiter.....	27
Gambar 4. Faktor Psikologis	28
Gambar 5. Faktor Lingkungan	28
Gambar 6. Ilustrasi Investigasi	46
Gambar 7. Ilustrasi Wawancara	47
Gambar 8. Ilustrasi Wawancara Investigasi	50
Gambar 9. Ilustrasi Mekanisme Pertahanan Represi.....	58
Gambar 10. Ilustrasi Mekanisme Pertahanan Acting Out.....	60
Gambar 11. Ilustrasi Mendengarkan Aktif	64
Gambar 12. Model Resistensi.....	78
Gambar 13. Ilustrasi Observasi.....	79
Gambar 14. Ilustrasi Criminal Profiling	93
Gambar 15. Ilustrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP)	95
Gambar 16. Ilustrasi Crime Scene.....	98
Gambar 17. Ilustrasi The Disorganized Crime Scene	99
Gambar 18. Ilustrasi Motif Kejahatan Financial Gain.....	101

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan fenomena kriminal berdasarkan konsep dasar dan teori psikologi forensik yang relevan, serta prinsip-prinsip Kode Etik Psikologi Indonesia.

BAB I

Pengantar Psikologi Forensik

Sub Capaian Pembelajaran

Mahasiswa memahami definisi, konsep dasar, serta sejarah perkembangan Psikologi Forensik di dunia dan di Indonesia sebagai dasar keterkaitan antara psikologi dan sistem hukum.

Deskripsi Pembelajaran

1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai Psikologi Forensik sebagai bidang yang mengintegrasikan psikologi dan sistem hukum. Pembahasan mencakup definisi Psikologi Forensik, ruang lingkup kajian, serta karakteristik praktik profesional dalam konteks peradilan pidana maupun perdata. Mahasiswa diajak memahami konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dalam penerapan psikologi di ranah hukum.
2. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk mendalami konsep dasar Psikologi Forensik, termasuk prinsip asesmen dalam konteks hukum, tanggung jawab hukum, kapasitas mental, serta standar etika dan profesionalitas. Selain itu, mahasiswa menganalisis perbedaan mendasar antara Psikologi Forensik dan Psikologi Klinis, khususnya dalam hal tujuan intervensi, relasi profesional, serta implikasi etis dan hukum.
3. Mata kuliah ini juga mengulas sejarah dan perkembangan Psikologi Forensik di dunia dan di Indonesia, sehingga mahasiswa memahami dinamika pertumbuhan bidang ini dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Pembahasan diperluas dengan menelaah keterkaitan Psikologi Forensik dengan disiplin ilmu lain seperti hukum, kriminologi, dan psikiatri, serta memahami sistem legal dan tahapan proses peradilan yang melibatkan psikolog forensik.
4. Melalui kajian teori, studi kasus, dan analisis regulasi, mahasiswa dilatih untuk memahami peran psikolog forensik dalam konteks hukum, termasuk sebagai asesor, konsultan, maupun saksi ahli di persidangan. Mata kuliah

ini memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja, khususnya bagi mahasiswa yang akan berkiprah di bidang psikologi, hukum, lembaga pemasyarakatan, pendidikan, maupun layanan sosial yang bersinggungan dengan sistem peradilan.

Relevansi dengan Dunia Kerja

1. Memberikan landasan konseptual yang kuat mengenai keterkaitan antara psikologi dan sistem hukum, sehingga mahasiswa memiliki kerangka berpikir yang tepat ketika bekerja di lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga pemasyarakatan.
2. Membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai prinsip asesmen dan tanggung jawab hukum, yang menjadi dasar dalam praktik profesional sebagai psikolog, konsultan, maupun tenaga ahli yang terlibat dalam proses investigasi dan persidangan.
3. Melatih kemampuan membedakan peran klinis dan forensik, sehingga lulusan mampu menjaga batas profesional, objektivitas, serta integritas ketika bekerja dalam setting hukum yang menuntut akuntabilitas tinggi.
4. Menumbuhkan kesadaran terhadap standar etika, regulasi, dan prosedur hukum, yang sangat penting dalam profesi yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, perlindungan korban, serta penanganan pelaku tindak pidana.
5. Mengembangkan perspektif multidisipliner melalui pemahaman keterkaitan psikologi dengan hukum, kriminologi, dan psikiatri, sehingga mahasiswa siap bekerja dalam tim lintas profesi di institusi pemerintah maupun swasta.
6. Meningkatkan kesiapan profesional mahasiswa untuk berperan sebagai asesor, konsultan, maupun saksi ahli, dengan kemampuan menyampaikan analisis psikologis secara sistematis, berbasis bukti, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

1.1 Definisi Psikologi Forensik

Psikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa atau *mind*, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah

ilmu yang mempelajari jiwa, pikiran, dan perilaku manusia. Sedangkan kata 'forensik' berasal dari kata *forensis*, artinya forum. Di zaman Romawi kuno, forum adalah tempat masyarakat berkumpul untuk membahas masalah publik, termasuk perselisihan hukum.

Seiring perkembangan zaman, konsep forum berubah menjadi pengadilan, yaitu sebuah wadah untuk mencari kebenaran hukum. Karena itu, segala sesuatu yang terkait dengan 'forensik' berarti berkaitan dengan proses hukum.



Gambar 1. Ilustrasi Peradilan
Sumber: AI

Jadi, ketika dua kata ini digabung, gambaran awal psikologi forensik adalah penerapan ilmu psikologi dalam konteks hukum. Psikologi forensik itu bukan sekadar teori, tetapi bentuk layanan psikologi dalam konteks hukum. Artinya, psikolog forensik memberikan *assessment*, opini ahli, dan intervensi yang relevan dalam perkara hukum.

Psikologi forensik bergerak di dua ranah utama, yaitu:

Klinis → misalnya memberikan evaluasi psikologis, menilai kompetensi terdakwa, memeriksa korban atau saksi.

Eksperimental → meneliti perilaku saksi, mempelajari bias kognitif dalam proses hukum, mempelajari pengambilan keputusan juri, dan sebagainya.

American Board of Forensic Psychology mendefinisikan psikologi forensik sebagai penerapan dari ilmu dan profesi psikologi untuk pertanyaan dan masalah hukum serta sistem hukum. Definisi ini menekankan beberapa hal penting:

1. Psikologi forensik adalah penerapan ilmu dan profesi; bukan sekadar teori.
2. Fokusnya adalah pada pertanyaan hukum, seperti: apakah terdakwa kompeten? apakah anak memerlukan perlindungan khusus? apakah pelaku berpotensi mengulangi kejahatan?
3. Psikologi forensik tidak bekerja sendiri; ia terintegrasi dalam proses hukum.

Contoh konkret:

- Menilai apakah seseorang mampu memahami proses persidangan.
- Memberikan pendapat ahli apakah kekerasan yang dialami korban dapat menyebabkan trauma tertentu.
- Menganalisis risiko residivisme pelaku.

Definisi ini kemudian dipertegas lagi oleh lembaga psikologi terbesar di dunia, yaitu *American Psychological Association* (APA). Menurut APA, psikologi forensik adalah praktik profesional oleh psikolog yang memberikan keahlian psikologis kepada sistem peradilan.

Poin pentingnya:

- Fokus pada praktik profesional; bukan hanya riset.
- Yang memberi layanan adalah psikolog terlatih; bukan orang awam atau profesi lain.
- Tugasnya memberikan keahlian khusus—misalnya interpretasi hasil tes, wawancara klinis, analisis perilaku pelaku.
- Target penerima layanan adalah sistem peradilan (baik pidana maupun perdata).

Selain lembaga, para ahli di bidang ini juga memberikan definisi yang memperkaya perspektif. Goldstein (2003) memberikan definisi yang lebih luas dan terperinci terkait ruang lingkup kerja psikologi forensik. Menurut Goldstein (2003), psikologi forensik melibatkan:

- Psikologi terapan
- Metode penelitian

- Teori
- Praktik profesional
- Dan metodologi khusus yang dirancang untuk konteks hukum

Contohnya:

- Wawancara investigatif
- Tes psikologis pada pelaku atau korban
- Penilaian risiko kekerasan
- Instrumen yang relevan secara forensik

Artinya, psikologi forensik bukan hanya tentang profiling pelaku, tapi juga tentang metodologi ilmiah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Definisi Goldstein (2003) menekankan bahwa bidang ini multidisipliner dan memerlukan keahlian teknis serta etika yang tinggi.

Untuk merangkum semua definisi di atas, berikut adalah kesimpulan psikologi forensik secara praktis. Psikologi forensik mencakup:

1. Semua bentuk layanan psikologi yang dilakukan dalam konteks hukum.

Artinya, layanan ini melibatkan perkara perdata, pidana, keluarga, anak, hingga industri (misalnya kasus perselisihan kerja).

2. Penerapan psikologi untuk membantu aparat hukum mencapai kebenaran.

Psikolog forensik memberi data dan pendapat ilmiah agar keputusan hukum menjadi lebih objektif.

3. Bergerak dalam dua domain besar:

- **Kajian keilmuan (riset):** misalnya penelitian tentang akurasi memori saksi.
- **Praktik psikologis:** seperti asesmen, pemberian keterangan ahli, profiling, atau konsultasi investigatif.

Dengan kata lain, psikologi forensik berada di titik pertemuan antara ilmu psikologi dan sistem peradilan, yaitu bekerja untuk memahami manusia dalam konteks hukum.

1.2 Konsep Dasar Psikologi Forensik

Psikologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *psyche* yang berarti jiwa atau *mind*, dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa, pikiran, dan perilaku manusia. Sedangkan kata 'forensik' berasal dari kata *forensis*, artinya forum. Di zaman Romawi kuno, forum adalah tempat masyarakat berkumpul untuk membahas masalah publik, termasuk perselisihan hukum.

Konsep dasar psikologi forensik meliputi pemahaman tentang perilaku manusia dalam konteks hukum, pendekatan ilmiah terhadap pengumpulan fakta, serta batasan profesional etik dalam situasi legal. Psikologi forensik sangat dekat dengan psikologi klinis karena melibatkan asesmen kepribadian, diagnosis gangguan mental, serta perhitungan risiko kekambuhan (*reoffending*). Meski demikian, fokus keduanya berbeda. psikologi klinis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan klien, sedangkan psikologi forensik berorientasi pada *fact-finding*, objektivitas, dan ketepatan dalam mendukung keputusan hukum (Heilbrun, 2016).

Elemen konsep dasar meliputi:

1. Asesmen Forensik

Menilai kompetensi individu untuk diadili, kapasitas tanggung jawab pidana, risiko kekerasan, kredibilitas saksi, hingga kondisi psikologis korban. Teknik yang digunakan mencakup wawancara forensik, observasi perilaku, tes psikologis standar, dan instrumen spesifik (misalnya HCR-20 untuk asesmen risiko kekerasan).

2. Intervensi Forensik

Mencakup terapi bagi pelaku kriminal, konseling untuk korban, mediasi, dan intervensi koreksional berbasis bukti (Andrews & Bonta, 2017).

3. Etika dan Batasan Profesional

Psikolog forensik tidak bertugas sebagai terapis pribadi. Mereka harus menjaga objektivitas, transparansi, dan tetap pada peran sebagai evaluator yang melayani sistem hukum (Weiner & Otto, 2014).

4. Psikologi dan Hukum

Perbedaan tujuan antara psikologi (deskriptif, ilmiah) dan hukum (normatif, preskriptif) menuntut psikolog forensik untuk mampu mengintegrasikan keduanya.

1.3 Sejarah dan Perkembangan Psikologi Forensik

1. Perkembangan Global

Tonggak sejarah psikologi forensik dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Akar Sejarah (Akhir 1800–Awal 1900-an)

- **Hugo Münsterberg**, dianggap sebagai bapak psikologi forensik, menerbitkan *On the Witness Stand* pada 1908 yang membahas bukti psikologis dalam persidangan.
- **William Stern** mempelajari keandalan kesaksian saksi mata (*eyewitness testimony*).
- **Lightner Witmer** mengajarkan kuliah psikologi kejahatan pertama.
- **William Healy** mendirikan *Chicago Juvenile Psychopathic Institute* (1909) yang memfokuskan diri pada asesmen anak bermasalah.

b. Periode Institusionalisasi (1920–1960)

Psikolog mulai diakui sebagai saksi ahli dalam pengadilan (sekitar 1921). Namun, peran psikolog masih terbatas pada asesmen kompetensi dan gangguan mental.

c. Kemajuan Pesat Era 1960–2000

- 1962: Psikolog mulai melakukan asesmen penderita gangguan mental yang terjerat kasus hukum.

- 1969: Berdirinya *American Psychology–Law Society (AP-LS)*, di mana hal ini merupakan titik penting dalam formalisasi disiplin.

d. Era Modern (2000–sekarang)

Bidang ini berkembang melalui penelitian empiris, teknologi asesmen risiko, neuropsikologi forensik, hingga penggunaan data digital dalam investigasi. Perkembangan terkini banyak dipengaruhi oleh isu-isu seperti bias rasial, keadilan restoratif, dan keandalan bukti ilmiah (Neal & Brodsky, 2021).

2. Perkembangan Psikologi Forensik di Indonesia

Perkembangan psikologi forensik di Indonesia relatif baru:

a. Awal Kemunculan (2000-an)

Kasus besar seperti Sumanto (2003) memperlihatkan pentingnya peran psikolog dalam memahami motif kejahatan, kondisi kejiwaan pelaku, dan implikasi hukum.

b. Kelembagaan (2007)

Pembentukan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) pada 3 November 2007 menandai formalnya bidang ini. Apsifor berada di bawah HIMPSI dan berfungsi sebagai pusat pengembangan standar kompetensi, etik, dan pelatihan.

c. Perkembangan Praktik

Psikolog forensik kini berperan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, hingga kementerian, seperti Kemenkeu dan BNN.

1.4 Psikologi Forensik vs Psikologi Klinis

Pada bagian ini kita akan melihat hubungan antara psikologi forensik dan psikologi klinis. Banyak orang berpikir bahwa keduanya sangat berbeda, tetapi sebenarnya psikologi forensik lahir dari akar psikologi klinis.

1. Psikologi Forensik adalah Cabang dari Psikologi Klinis

Psikologi forensik merupakan bagian integral dari psikologi klinis. Artinya, fondasi utama psikologi forensik adalah pemahaman tentang gangguan mental, asesmen klinis, diagnosis, dan intervensi psikologis.

2. Yang Membedakan adalah Konteks Hukumnya

Perbedaannya bukan pada alat yang digunakan, tetapi pada tujuan, konteks, kepentingan hukum, dan konsekuensi penggunaannya.

Penekanan psikologi forensik meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Asesmen dan Intervensi Klinis dalam Konteks Hukum

Psikolog forensik melakukan asesmen klinis, tetapi hasilnya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan hukum. Misalnya:

- menilai kewarasan terdakwa,
- menilai apakah pelaku memahami tuduhan,
- menilai apakah korban mengalami trauma yang dapat berdampak pada kesaksian.

2. Gangguan Klinis dan Abnormal

Psikolog forensik harus memahami betul diagnosis klinis, seperti gangguan psikotik, kecanduan, gangguan kepribadian, trauma, depresi berat, dan sebagainya, karena gangguan ini dapat memengaruhi tindakan kriminal maupun kesaksian.

3. Asesmen Risiko dan Potensi Melakukan Kejahatan

Ini merupakan bagian yang khas forensik. Psikolog akan menilai:

- risiko kekerasan,
- risiko residivisme (mengulangi tindak kriminal),
- kecenderungan impulsif atau agresif,
- faktor protektif dan risiko.

Hasil penilaian ini sering digunakan oleh hakim untuk menentukan penahanan, pembebasan bersyarat, atau rekomendasi intervensi.

4. Cedera Pribadi (Akibat Kelalaian Orang Lain)

Psikolog forensik juga terlibat dalam kasus perdata. Contohnya:

- kecelakaan kerja,
- trauma psikis akibat kekerasan,
- cyberbullying,
- pelecehan.

Psikolog menilai tingkat kerugian mental untuk keperluan kompensasi.

5. Civil Commitment

Civil commitment adalah proses mengajukan individu untuk dirawat paksa karena gangguan mental berat atau kecanduan, demi keamanannya sendiri atau orang lain.

Psikolog di sini berperan memberikan rekomendasi apakah seseorang perlu diinstitusionalisasi.

Berikut adalah perbedaan psikologi forensik dan psikologi klinis secara lebih sistematis.

Tabel 1. Perbedaan Psikologi Forensik dan Psikologi Klinis

	Psikologi Forensik	Psikologi Klinis
Tujuan	Tujuan utamanya adalah mengumpulkan data yang akurat, reliabel, dan objektif untuk menjawab pertanyaan hukum. Hasil asesmen akan digunakan oleh hakim, polisi, atau lembaga hukum lainnya.	Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan psikologis klien; <i>to promote well-being</i> . Fokusnya adalah membantu klien pulih.
Fokus	Psikolog forensik fokus pada pencarian fakta. Ia	Fokusnya adalah persepsi, pengalaman emosional, dan

	Psikologi Forensik	Psikologi Klinis
	membutuhkan informasi seobjektif mungkin, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang klien klaim.	atribusi klien terhadap suatu peristiwa. Psikolog klinis memiliki pendekatan yang lebih humanistik.
Kualitas Hubungan	Hubungan psikolog-klien bersifat netral, objektif, dan <i>non-therapeutic</i> . Tujuannya bukan membangun kepercayaan yang mendalam, tetapi menjaga jarak profesional dan menghindari bias.	Hubungan terapeutik sangat diperlukan. Empati, penerimaan, dan kehangatan adalah inti dari proses terapi, yang biasanya disebut <i>therapeutic alliance</i> .
Klien	Klien sebenarnya bukan orang yang diperiksa, tetapi institusi hukum. Jadi psikolog forensik bekerja mewakili kepentingan pengadilan; bukan kepentingan individu.	Klien adalah individu yang mencari bantuan: anak, dewasa, keluarga.
Consent	Dalam konteks forensik, ada kemungkinan mendapatkan data dari pihak luar tanpa persetujuan klien. Juga ada kemungkinan hasil asesmen wajib diungkap ke pengadilan (<i>disclosed</i>).	<i>Consent</i> sangat diperlukan dan wajib diberikan kepada klien.
Tipe Interview	Interview forensik sangat formal, terstruktur, dan restriktif. Pertanyaannya harus konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak boleh <i>leading</i> .	<i>Interview</i> dapat lebih fleksibel, mengikuti alur klien, dan menyesuaikan kebutuhan terapi.
Kerahasiaan	Kerahasiaan terbatas. Banyak hal yang diungkap klien dapat (atau wajib) dilaporkan ke pengadilan.	Kerahasiaan mengikuti prinsip etika psikologi tradisional. Data klien dilindungi, kecuali ada risiko serius.

	Psikologi Forensik	Psikologi Klinis
Kompetensi Klien	Menilai kompetensi klien adalah hal yang diperlukan: <ul style="list-style-type: none"> • apakah klien bisa memahami proses hukum? • apakah ia bisa bekerja sama? • apakah ia mampu membuat keputusan? 	Kompetensi klien bukan fokus utama.
Data	Dokumentasi sangat ketat. Setiap catatan harus lengkap dan bisa diperiksa kembali.	Data bersifat privat; untuk kepentingan terapi.
Durasi	Durasi biasanya singkat dan dibatasi hukum acara. Misalnya: waktu asesmen hanya dua sesi karena batas panggilan pengadilan.	Durasi bisa panjang. Bisa mingguan, bulanan, atau tergantung kebutuhan.

Jadi, meskipun psikologi forensik dan klinis memiliki akar yang sama, keduanya berbeda dari sisi tujuan, orientasi, kepentingan, kerahasiaan, strategi, dan hubungan dengan klien.

Psikologi forensik jauh lebih terikat hukum dan memiliki konsekuensi legal yang besar.

1.5 Psikologi Forensik dan Disiplin Ilmu yang Lain

Sebelum kita masuk lebih jauh ke peran psikologi forensik, kita perlu memahami bahwa bidang forensik itu tidak berdiri sendiri. Forensik adalah payung besar yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang memberikan kontribusi penting dalam penegakan hukum. Salah satu di antaranya adalah psikologi forensik.

Jadi meskipun kita fokus pada psikologi forensik, perlu diketahui dulu bahwa bidang ini bekerja berdampingan dengan banyak disiplin lain, dan semuanya mempunyai fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi.

1. Ilmu Fisika Forensik

Fisika forensik menganalisis bukti fisik menggunakan prinsip fisika.

Contohnya:

- analisis sidik jari,
- pola pecahan kaca,
- analisis lintasan peluru,
- rekonstruksi kecelakaan.

Hal ini akan membantu penyidik mengetahui bagaimana suatu peristiwa terjadi secara fisik.

2. Ilmu Kimia Forensik

Kimia forensik fokus pada analisis bahan kimia dalam kasus hukum, seperti:

- identifikasi narkoba,
- analisis residu tembakan,
- pemeriksaan racun,
- analisis serat, cat, atau cairan.

Justru banyak kasus pembunuhan modern terungkap berkat temuan laboratorium kimia forensik.

3. Ilmu Psikologi Forensik

Psikologi forensik memeriksa aspek perilaku, mental, dan motivasi manusia dalam konteks hukum.

Psikolog forensik menilai:

- kondisi mental pelaku,
- trauma korban,
- kapasitas kompetensi saksi,
- risiko kekerasan,
- profil psikologis pelaku.

Di antara semua disiplin forensik, psikologi berfokus pada manusia (pikiran, emosi, perilaku).

4. Ilmu Kedokteran Forensik

Kedokteran forensik atau forensik medikolegal memeriksa bukti biologis pada tubuh manusia.

Contohnya:

- pemeriksaan jenazah,
- identifikasi luka,
- analisis penyebab kematian,
- *time of death*.

Peran dokter forensik sangat vital, terutama dalam kasus pembunuhan.

5. Ilmu Toksikologi Forensik

Toksikologi forensik memeriksa paparan zat kimia atau obat dalam tubuh.

Biasanya digunakan untuk kasus:

- overdosis,
- keracunan,
- driving under influence (DUI),
- kasus narkotika.

Temuan toksikologi sering menjadi bukti yang menentukan di pengadilan.

6. Ilmu Psikiatri Forensik & Komputer Forensik

Psikiatri forensik mirip dengan psikologi forensik, tetapi dilakukan oleh dokter spesialis kejiwaan. Mereka bisa memberikan diagnosis medis dan meresepkan obat.

Psikiater forensik sering menentukan apakah pelaku membutuhkan perawatan intensif.

Sedangkan komputer forensik memeriksa bukti digital seperti:

- log data,
- *email*,
- *file* yang dihapus,
- transaksi digital.

Hal ini diperlukan di era *cybercrime*.

7. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik fokus pada kejahatan keuangan, seperti:

- penggelapan,
- korupsi,
- *money laundering*,
- manipulasi laporan keuangan,
- penipuan transaksi.

Mereka menganalisis aliran uang untuk menemukan pola kriminal.

Jika diperhatikan, setiap disiplin memiliki fokus bukti yang berbeda:

- Fisika → Benda
- Kimia → Zat
- Kedokteran → Tubuh
- Toksikologi → Racun/Obat
- Komputer → Data Digital
- Akuntansi → Keuangan
- Psikiatri & Psikologi → Manusia

Semua bidang ini bekerja bersama untuk menyatukan potongan *puzzle* kasus hukum.

1.6 Sistem Legal dan Kaitannya dengan Psikologi Forensik

Psikologi forensik bekerja dalam dua sistem hukum utama:

1. Hukum Pidana

- Mengatur perbuatan yang dianggap membahayakan publik.
Psikolog terlibat dalam:
- evaluasi tanggung jawab pidana,

- kompetensi untuk diadili,
- asesmen risiko kekambuhan,
- evaluasi pelaku kekerasan atau kejahatan seksual,
- pemberian keterangan ahli di persidangan.

2. Hukum Perdata

Mengatur sengketa antar individu atau badan hukum (misalnya hak asuh, kompensasi cedera, adopsi, dan kapasitas kontraktual).

Dalam konteks ini, psikolog forensik membantu:

- asesmen kelayakan hak asuh,
- evaluasi kapasitas mental,
- mediasi sengketa keluarga,
- pemeriksaan kondisi psikologis korban dalam kasus perlindungan anak.

3. Perbedaan Psikologi vs Hukum

Hukum bersifat normatif dan preskriptif, sedangkan psikologi berbasis bukti empiris. Psikolog forensik harus dapat menjembatani keduanya (Melton et al., 2018).

1.7 Peran Psikolog Forensik dalam Konteks Hukum

Peran psikolog forensik mencakup:

1. Evaluator Forensik

- Menilai kompetensi hukum
- Menilai kapasitas tanggung jawab pidana
- Menilai risiko kekerasan
- Menilai kredibilitas saksi dan trauma korban

2. Konsultan Penegakan Hukum

Bekerja dengan kepolisian, BNN, KPK, dan lembaga lain dalam:

- profiling pelaku,
- investigasi psikologis,
- wawancara saksi korban,
- analisis perilaku tersangka.

3. Saksi Ahli

Memberikan pendapat ilmiah dalam pengadilan untuk membantu hakim memahami kondisi psikologis individu (Otto & Heilbrun, 2016).

4. Peneliti

Mempelajari perilaku kriminal, efektivitas hukuman, bias dalam persidangan, hingga keadilan restoratif.

5. Intervensi

Melakukan rehabilitasi bagi pelaku maupun korban, termasuk intervensi dalam lembaga pemasyarakatan.

6. Mediasi dan Konsiliasi

Membantu penyelesaian konflik perdata dan keluarga.

1.8 Rangkuman

Psikologi forensik adalah cabang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan prinsip, metode, dan temuan psikologi secara spesifik dalam konteks hukum, mencakup ranah pidana maupun perdata. Menurut Bartol & Bartol (2021), bidang ini luas, meliputi asesmen psikologis terhadap pihak-pihak yang terlibat—mulai dari tersangka, pelaku, korban, hingga saksi; melakukan penelitian tentang perilaku kriminal; memberikan konsultasi kepada aparat penegak hukum; serta berperan sebagai saksi ahli di pengadilan.

Secara definitif, *American Board of Forensic Psychology* (2007) menyebut psikologi forensik sebagai praktik profesional yang menyumbangkan keahlian psikologis pada sistem peradilan. Kontribusi ini diwujudkan melalui evaluasi objektif, pemetaan risiko, dan penyediaan penjelasan ilmiah mengenai kondisi mental seseorang yang relevan dengan proses hukum. Penting untuk dipahami bahwa psikologi forensik berbeda dari psikologi umum, terutama dalam hal tujuan (pencarian fakta hukum vs. kesejahteraan individu), sifat relasi kerja, isu kerahasiaan, dan batasan etis.

Perkembangan historis psikologi forensik bermula pada awal 1900-an. Tokoh-tokoh kunci pada masa itu meliputi Hugo Münsterberg dengan

karyanya *On the Witness Stand* (1908), William Stern yang meneliti keandalan kesaksian saksi mata, Lightner Witmer yang mengajarkan psikologi kejahatan, serta William Healy yang mendirikan *Chicago Juvenile Psychopathic Institute* pada 1909. Setelah tahun 1920 hingga 1960, psikolog mulai diakui sebagai saksi ahli, dan penguatan disiplin ini dalam ranah akademik dan praktik profesional terjadi melalui pembentukan *American Psychology–Law Society* pada 1969.

Di Indonesia, bidang ini baru mulai menampakkan perkembangan signifikan pada awal 2000-an. Kasus Sumanto pada tahun 2003 sering dianggap sebagai titik tolak penting yang menunjukkan mendesaknya kebutuhan akan asesmen kejiwaan dalam proses penegakan hukum. Penguatan kelembagaan dicapai dengan pendirian Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia (Apsifor) pada 3 November 2007. Apsifor memiliki peran krusial dalam menetapkan standar kompetensi psikolog forensik dan memperluas peran mereka dalam institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Inti dari psikologi forensik adalah perannya sebagai jembatan yang menghubungkan pemahaman ilmiah tentang perilaku manusia (psikologi) dengan kebutuhan normatif dunia peradilan (hukum). Jika psikologi berorientasi pada penjelasan empiris mengenai *bagaimana* dan *mengapa* seseorang bertindak, hukum berfokus pada standar *seharusnya* seseorang berperilaku dan menetapkan sanksi atas pelanggaran norma.

Keterlibatan psikolog forensik mencakup berbagai tugas, seperti:

- Asesmen kompetensi untuk diadili.
- Evaluasi tanggung jawab pidana.
- Pemeriksaan kondisi psikologis korban dan saksi.
- Analisis risiko kekerasan.
- Mediasi dalam sengketa perdata.
- Konsultasi investigatif untuk lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan BNN.

Dengan demikian, psikologi forensik merupakan disiplin yang sangat

penting untuk menjamin proses hukum—mulai dari tahap penyelidikan (lidik), penyidikan (sidik), penuntutan, persidangan, hingga pemyarakatan—dijalankan secara objektif, manusiawi, dan berbasis bukti ilmiah.

1.9 Bahan Diskusi

1. Mengapa objektivitas memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam psikologi forensik dibandingkan psikologi klinis? Bagaimana risiko jika seorang psikolog forensik terlalu “empatik” seperti dalam praktik klinis?
2. Mengapa kesaksian saksi mata tidak selalu dapat dipercaya? Faktor psikologis apa saja yang dapat memengaruhi akurasi ingatan saksi, dan bagaimana psikologi forensik membantu menilai reliabilitasnya?
3. Menurut Anda, aspek apa dari kasus Sumanto yang menunjukkan pentingnya asesmen psikologis dalam proses hukum? Jika kasus serupa terjadi hari ini, apa yang harus dilakukan oleh psikolog forensik untuk memastikan proses hukum yang objektif dan manusiawi?
4. Bagaimana seorang psikolog forensik dapat menjembatani kesenjangan antara “kebenaran ilmiah” dan “keputusan hukum” yang harus dibuat hakim? Berikan contoh situasi di mana keduanya mungkin bertentangan.
5. Dari berbagai peran psikolog forensik, mana yang menurut Anda paling berisiko menghadapi tekanan atau bias dari aparat hukum? Bagaimana psikolog forensik dapat menjaga independensi profesional dan integritas ilmiah dalam situasi tersebut?

1.10 Feedback

1. Diskusi mengenai objektivitas dalam psikologi forensik sudah mengarah pada pemahaman yang tepat bahwa posisi psikolog forensik adalah evaluator independen, bukan pendamping terapeutik. Penekanan pada risiko ketika psikolog terlalu empatik—misalnya kehilangan jarak profesional, bias konfirmasi, atau keberpihakan emosional—menunjukkan kesadaran akan perbedaan mendasar

antara relasi evaluatif dan relasi terapeutik. Ke depan, analisis dapat diperdalam dengan mengaitkannya pada standar etika profesi dan potensi implikasi hukum jika objektivitas terganggu.

2. Pembahasan tentang reliabilitas kesaksian saksi mata telah menyentuh aspek penting bahwa ingatan bersifat konstruktif, bukan rekaman statis. Identifikasi faktor-faktor seperti stres, sugesti, bias kognitif, tekanan interogasi, dan efek misinformation menunjukkan pemahaman psikologis yang relevan. Akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan metode konkret yang digunakan psikologi forensik, seperti teknik wawancara kognitif atau analisis konsistensi naratif untuk menilai kredibilitas.
3. Analisis terhadap kasus Sumanto menunjukkan kemampuan melihat urgensi asesmen psikologis dalam menentukan kapasitas mental dan tanggung jawab pidana. Penekanan pada pentingnya pemeriksaan objektif untuk mencegah kesalahan penilaian hukum sudah tepat. Untuk memperdalam, diskusi dapat mencakup bagaimana prosedur asesmen modern (multi-metode, multi-sumber data, standar DSM/ICD) diterapkan guna memastikan proses yang adil dan manusiawi.
4. Pertanyaan mengenai jembatan antara “kebenaran ilmiah” dan “keputusan hukum” telah membuka ruang refleksi kritis yang baik. Pemahaman bahwa hukum bekerja dalam kerangka normatif (beyond reasonable doubt) sementara psikologi bekerja dalam kerangka probabilistik dan empiris menunjukkan integrasi konseptual yang matang. Contoh situasi konflik—misalnya ketika hasil asesmen menunjukkan risiko kekerasan tinggi tetapi bukti hukum tidak cukup—dapat dianalisis lebih mendalam untuk menegaskan batas kewenangan psikolog dan hakim.
5. Identifikasi peran yang paling rentan terhadap tekanan—seperti saksi ahli atau konsultan investigatif—menunjukkan kesadaran terhadap dinamika kekuasaan dalam sistem peradilan. Diskusi tentang pentingnya menjaga independensi profesional melalui dokumentasi transparan, penggunaan instrumen terstandar, dan kepatuhan pada

kode etik sudah berada pada arah yang benar. Ke depan, dapat dipertajam dengan membahas mekanisme supervisi, peer review, dan akuntabilitas profesi sebagai perlindungan terhadap bias eksternal.

1.11 Refleksi

1. Setelah memahami perbedaan orientasi antara psikologi forensik dan psikologi klinis, sejauh mana Anda melihat bahwa objektivitas harus ditempatkan di atas empati dalam konteks hukum?
2. Apakah menurut Anda mungkin menjaga keseimbangan antara memahami kondisi individu dan tetap mempertahankan jarak profesional?
3. Ketika mengetahui bahwa ingatan saksi mata bersifat konstruktif dan rentan distorsi, bagaimana hal ini memengaruhi cara Anda memandang konsep “kebenaran” dalam proses hukum?
4. Apakah keyakinan seseorang terhadap peristiwa cukup untuk dianggap sebagai bukti yang dapat dipercaya?

1.12 Asesmen: Kuis

1. Seorang psikolog forensik diminta untuk menilai kondisi mental seorang terdakwa dalam kasus pembunuhan. Apa tujuan utama dari asesmen ini?
 - a. Menentukan hukuman yang akan dijatuhkan
 - b. Mengidentifikasi apakah terdakwa dapat diadili secara hukum
 - c. Membantu jaksa dalam menyusun surat dakwaan
 - d. Menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak
 - e. Memberikan terapi kepada terdakwa
2. Buku karya Hugo Münsterberg yang menjadi fondasi awal bagi psikologi forensik adalah...
 - a. *The Criminal Mind*
 - b. *On the Witness Stand*
 - c. *Forensic Psychology: A Legal Guide*
 - d. *Psychology and the Law*
 - e. *The Psychology of Crime*

3. Mata kuliah psikologi forensik pertama di Amerika Serikat diajarkan oleh:
 - a. William James
 - b. Lightner Witmer
 - c. William Healy
 - d. Alfred Binet
 - e. Hugo Münsterberg

4. Apa fokus utama psikologi forensik sebagai bagian integral dari psikologi klinis?
 - a. Criminal profiling dan pelatihan penegak hukum
 - b. Asesmen dan intervensi klinis dalam konteks legal
 - c. Melakukan terapi hanya untuk narapidana
 - d. Menyelidiki TKP dan mengumpulkan bukti
 - e. Mempelajari teori-teori psikologi umum tanpa aplikasi hukum

5. Dalam kasus hukum, psikologi forensik dapat digunakan dalam dua aspek utama, yaitu:
 - a. Psikologi sosial dan psikologi klinis
 - b. Psikologi klinis dan psikologi eksperimental
 - c. Psikologi investigatif dan hukum perdata
 - d. Psikologi sosial dan psikologi kognitif
 - e. Psikologi perkembangan dan psikologi industry

Referensi

- American Board of Forensic Psychology. (2007). *Specialty guidelines for forensic psychology*.
- American Psychological Association. (2001). *Specialty guidelines for forensic psychology*.
- Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). Routledge.
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2021). *Introduction to forensic psychology* (6th ed.). Sage.
- Goldstein, A. M. (2003). *Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles*. Wiley.
- Heilbrun, K. (2016). *Principles of forensic mental health assessment*. Springer.
- Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., & Slobogin, C. (2018). *Psychological evaluations for the courts* (4th ed.). Guilford.
- Munsterberg, H. (1908). *On the witness stand: Essays on psychology and crime*. Doubleday.
- Neal, T. M. S., & Brodsky, S. L. (2021). *Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Neal, T. M. S., et al. (2019). Forensic psychology and the law: Research trends. *Annual Review of Psychology*, 70, 483–509.
- Otto, R. K., & Heilbrun, K. (2016). The role of forensic psychologists in legal settings. *American Psychologist*, 71(8), 715–726.
- Weiner, I. B., & Otto, R. K. (2014). *Handbook of forensic psychology* (4th ed.). Wiley.

1.13 Rubrik

Kriteria	Bobot	45-54.99	55-69.99	Mastery 70-84.99	85-100
Akurasi dalam menjelaskan konsep-konsep dasar psikologi forensik dan peran psikolog forensik dalam bidang hukum.	100%	Sesuai dengan jumlah jawaban benar pada kuis.	Sesuai dengan jumlah jawaban benar pada kuis.	Sesuai dengan jumlah jawaban benar pada kuis.	Sesuai dengan jumlah jawaban benar pada kuis.

BAB II

Teori Psikologi Kriminalitas dan Anak Berkonflik Dengan Hukum

Sub Capaian Pembelajaran

Siswa mampu menganalisis faktor-faktor penyebab perilaku kriminal.

Deskripsi Pembelajaran

1. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dasar mengenai perilaku kriminal, mencakup definisi perilaku kriminal, karakteristiknya, serta berbagai bentuk dan konteks kemunculannya. Mahasiswa diajak mengeksplorasi konsep-konsep teoretis dan fakta empiris yang berkaitan dengan perilaku kriminal melalui kajian literatur dan studi kasus.
2. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perilaku kriminal, baik dari aspek psikologis, sosial, keluarga, budaya, maupun lingkungan. Mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan serta menganalisis informasi dan referensi yang relevan, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis dalam memahami dinamika penyebab perilaku kriminal.
3. Mata kuliah ini memiliki relevansi langsung dengan dunia kerja, khususnya bagi mahasiswa yang akan berkiprah di bidang psikologi, hukum, pendidikan, sosial, pelayan masyarakat, maupun layanan masyarakat.

Relevansi dengan Dunia Kerja

1. Menganalisis latar belakang psikologis pelaku tindak kriminal, memahami faktor risiko yang memicu perilaku kriminal, serta memberikan asesmen psikologis dan rekomendasi intervensi dalam proses hukum.

2. Mengidentifikasi dinamika psikologis, pengalaman traumatis, atau gangguan perilaku yang berpotensi berkaitan dengan munculnya perilaku kriminal, serta merancang program konseling dan rehabilitasi.
3. Memahami faktor penyebab perilaku kriminal untuk merancang program pembinaan, rehabilitasi, serta upaya pencegahan pengulangan tindak kriminal (residivisme).
4. Mengidentifikasi faktor risiko perilaku menyimpang pada remaja dan mengembangkan program pencegahan melalui pendidikan karakter, konseling, serta intervensi psikososial.
5. Membantu memahami dinamika perilaku pelaku maupun korban tindak kriminal sehingga proses penyelidikan, pemeriksaan, maupun penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
6. Mengidentifikasi faktor risiko dalam keluarga dan lingkungan yang dapat memicu perilaku kriminal, serta merancang program pencegahan dan perlindungan bagi kelompok rentan.

2.1 Definisi Perilaku Kriminal

Perilaku kriminal adalah setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi oleh negara. Dari sudut pandang psikologi forensik, perilaku kriminal tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai ekspresi dari dinamika psikologis individu, interaksi sosial, serta faktor lingkungan yang kompleks.



Gambar 2. Perilaku Kriminal

Sumber:

<https://www.kompasiana.com/novipratiwi216887/67b9cc12c925c445e11bf5a2/maraknya-terjadi-kasus-kriminalitas-di-indonesia>

Menurut Bartol & Bartol (2019), perilaku kriminal merupakan tindakan yang disengaja dan bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh individu yang sadar akan konsekuensi tindakannya, namun tetap melakukannya karena adanya motif internal atau pengaruh eksternal tertentu. Dengan demikian, perilaku kriminal bukan hanya sekadar hasil dari niat jahat (*mens rea*), melainkan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis, sosial, dan biologis.

Dalam konteks psikologi forensik, perilaku kriminal dikaji untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana proses kognitif dan emosional yang mendasarinya, serta bagaimana intervensi atau penanganan yang tepat dapat dilakukan baik untuk tujuan rehabilitasi maupun pencegahan.

2.2 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perilaku Kriminal

Perilaku kriminal bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari berbagai aspek berikut:

a. Faktor Biologis



Gambar 3. Ketidakseimbangan Neurotransmitter

Sumber:

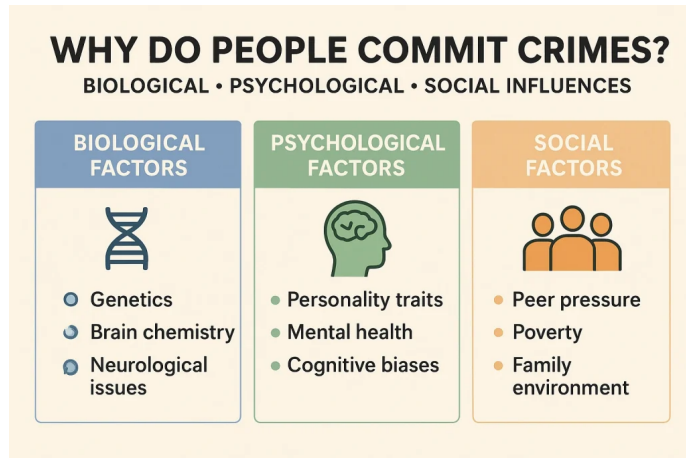
<https://www.integrativehealthpractitioner.org/5-signs-of-a-neurotransmitter-imbalance/>

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan neurobiologis dapat berperan dalam kecenderungan individu terhadap perilaku agresif atau antisosial. Misalnya:

1. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin.
2. Disfungsi pada area otak seperti prefrontal cortex yang berperan dalam pengendalian impuls.

3. Riwayat cedera otak atau gangguan perkembangan neurologis.

b. Faktor Psikologis



Gambar 4. Faktor Psikologis

Sumber: <https://www.earlyyears.tv/crime-psychology-biology-social-guide/>

Kondisi kepribadian dan dinamika psikologis individu juga memengaruhi perilaku kriminal, seperti:

1. Gangguan kepribadian antisosial, narsistik, atau borderline.
2. Rendahnya empati dan kontrol diri.
3. Pola pikir distorsif seperti justifikasi terhadap perilaku jahat ("Saya hanya membalas perlakuan orang lain").

Pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, penolakan, atau pengabaian.

c. Faktor Sosial dan Lingkungan



Gambar 5. Faktor Lingkungan

Sumber:

<https://pringsewuonline.com/lingkungan-sosial-adalah/>

Lingkungan sosial memiliki peran besar dalam pembentukan perilaku kriminal:

1. Pengaruh kelompok teman sebaya atau *peer pressure*.
2. Kondisi keluarga disfungsi, kurangnya pengawasan orang tua, atau kekerasan domestik.
3. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial.
4. Lingkungan masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi yang menormalkan perilaku menyimpang.

d. Faktor Situasional

Dalam beberapa kasus, seseorang yang tidak memiliki kecenderungan kriminal dapat melakukan kejahatan karena situasi tertentu, misalnya:

1. Dorongan emosi sesaat (kejahatan karena marah, cemburu, atau stres berat).
2. Tekanan sosial atau ancaman.

Peluang melakukan kejahatan yang tinggi dengan risiko tertangkap yang rendah.

Perilaku kriminal bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari berbagai aspek berikut:

2.3 Gangguan Kesehatan Mental yang Berhubungan Dengan Perilaku Kriminal

Tidak semua pelaku kejahatan memiliki gangguan jiwa, namun beberapa gangguan mental tertentu memang ada kaitannya dengan perilaku kriminal, misalnya Antisocial Personality Disorder (APD) dan psikopat.

Gangguan Kepribadian Antisosial (Antisocial Personality Disorder – ASPD) adalah kondisi psikologis di mana individu menunjukkan pola perilaku menetap yang mengabaikan dan melanggar hak orang lain, serta tidak menghormati norma sosial yang berlaku. Gangguan ini dikategorikan dalam Cluster B Personality Disorders menurut Diagnostic

and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5-TR).

1. Ciri utama individu dengan ASPD antara lain:

- a. Tidak menghormati hukum dan norma sosial, sering melakukan tindakan kriminal berulang.
- b. Menipu, manipulatif, atau memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi.
- c. Impulsif dan sulit merencanakan masa depan.
- d. Mudah marah, agresif, dan terlibat dalam perkelahian fisik.
- e. Tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, keuangan, atau hubungan sosial.
- f. Tidak merasa bersalah atau menyesal atas perbuatannya, meskipun merugikan orang lain.

Menurut DSM-5, diagnosis ASPD hanya dapat ditegakkan pada individu berusia 18 tahun ke atas, dengan bukti perilaku antisosial yang muncul sebelum usia 15 tahun, biasanya dalam bentuk gangguan perilaku (conduct disorder) pada masa remaja.

2. Aspek Psikologis dan Perkembangan

Secara psikologis, individu dengan ASPD sering memiliki:

- a. Empati rendah, yaitu ketidakmampuan memahami atau merasakan emosi orang lain.
- b. Kognisi moral yang dangkal, di mana mereka menilai benar-salah berdasarkan keuntungan pribadi, bukan prinsip etika.
- c. Masalah pengendalian impuls, sehingga sering bertindak tanpa mempertimbangkan akibat.
- d. Riwayat masa kecil yang penuh kekerasan, penelantaran, atau kurangnya kasih sayang, yang berperan dalam pembentukan perilaku antisosial.

Penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor biologis (seperti disfungsi pada korteks prefrontal) dan faktor lingkungan (seperti pola asuh keras atau penelantaran) sangat memengaruhi perkembangan ASPD.

Keterkaitan dengan Perilaku Kriminal

Individu dengan ASPD sangat rentan terlibat dalam perilaku kriminal karena:

- a. Mereka tidak takut terhadap hukuman atau otoritas.
- b. Mereka melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi.
- c. Impulsivitas membuat mereka melakukan kejahatan spontan tanpa pertimbangan matang.
- d. Kurangnya rasa bersalah membuat mereka tidak belajar dari konsekuensi hukum yang pernah diterima.

Banyak pelaku residivis (pengulangan tindak kejahatan) memiliki ciri-ciri kepribadian antisosial. Dalam konteks forensik, penilaian ASPD penting untuk menentukan risiko kekambuhan dan kebutuhan intervensi rehabilitatif.

Psikopati

Psikopati sering dianggap sebagai bentuk ekstrem dari ASPD, tetapi secara klinis memiliki karakteristik yang lebih spesifik. Konsep ini banyak dikembangkan oleh Dr. Robert Hare, melalui Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), alat ukur yang digunakan luas dalam bidang psikologi forensik.

Menurut Hare, psikopati bukan hanya perilaku antisosial, tetapi juga mencakup defisit emosional dan interpersonal yang mendalam. Dengan kata lain, psikopat tidak hanya bertindak jahat — mereka juga memiliki struktur kepribadian yang unik: menawan, manipulatif, namun tanpa empati dan hati nurani.

Ciri-ciri psikopati

Ciri-ciri psikopati dapat dikelompokkan menjadi dua dimensi utama:

Dimensi 1: Ciri Interpersonal dan Afektif

1. Pesona dangkal (superficial charm), cerdas berbicara, dan mudah menarik kepercayaan orang lain.

2. Manipulatif dan penuh kebohongan.
3. Tidak memiliki rasa bersalah atau penyesalan.
4. Empati sangat rendah; sulit memahami atau merasakan penderitaan orang lain.
5. Emosi dangkal, respons afektif datar, tidak mampu merasakan cinta atau takut dengan tulus.

Dimensi 2: Ciri Perilaku Antisosial

1. Impulsif, tidak mampu menahan dorongan sesaat.
2. Tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau kewajiban sosial.
3. Riwayat perilaku kriminal atau kenakalan remaja yang panjang.
4. Cenderung melakukan pelanggaran berulang meski sudah pernah dihukum.

Aspek Neurologis dan Psikologis

Penelitian neuropsikologis menunjukkan bahwa psikopat memiliki aktivitas rendah pada sistem limbik (terutama amigdala) yang berperan dalam pemrosesan emosi dan rasa takut.

Selain itu, gangguan pada korteks prefrontal ventromedial dapat membuat mereka tidak mampu memperkirakan konsekuensi moral dari tindakan mereka.

Dari sisi psikologis, mereka tahu secara kognitif bahwa tindakan mereka salah, tetapi tidak merasakannya secara emosional. Ini menjelaskan mengapa psikopat bisa meniru empati atau moralitas di depan orang lain untuk manipulasi sosial.

Psikopati dan Kriminalitas

Psikopat sering kali terlibat dalam kejahatan yang terencana dan kejam, seperti pembunuhan berantai, penipuan skala besar, atau kejahatan tanpa motif emosional (instrumental crimes).

Berbeda dengan pelaku impulsif pada ASPD, psikopat cenderung rasional, tenang, dan strategis dalam melakukannya. Mereka tidak mudah panik, bahkan saat berada di bawah tekanan.

Dalam konteks forensik, psikopati penting dipahami karena:

1. Memiliki risiko residivisme tertinggi di antara pelaku kejahatan lainnya.
2. Sulit direhabilitasi karena kurangnya motivasi untuk berubah.
3. Dapat meniru perilaku sosial yang “normal” untuk menghindari deteksi atau manipulasi sistem hukum.

Perbedaan ASPD dan Psikopat

Perbedaan antara Gangguan Kepribadian Antisosial (Antisocial Personality Disorder/ASPD) dan Psikopati seringkali tampak tipis karena keduanya sama-sama ditandai dengan perilaku yang melanggar norma sosial, manipulatif, dan kurang empati. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada dimensi emosional dan motivasional di balik perilaku tersebut. Individu dengan ASPD umumnya menunjukkan pola perilaku impulsif, agresif, dan sulit mengendalikan diri. Mereka sering terlibat dalam tindak kriminal karena dorongan sesaat, kemarahan, atau kebutuhan untuk memenuhi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Dengan kata lain, perilaku mereka cenderung reaktif dan tidak terencana. Sebaliknya, psikopat lebih menonjol dalam aspek kepribadian dan emosi. Mereka memiliki pesona dangkal, kemampuan manipulasi tinggi, serta ketiadaan empati dan rasa bersalah yang mendalam. Psikopat sering kali melakukan kejahatan dengan perencanaan yang matang, tenang, dan rasional, bukan karena impulsivitas, melainkan karena pandangan moral yang dingin dan kalkulatif.

Selain itu, dari sisi asal-usul, ASPD lebih sering dikaitkan dengan faktor lingkungan, seperti pengalaman masa kecil yang penuh kekerasan, pola asuh keras, atau pengabaian emosional. Sedangkan psikopati diyakini lebih kuat dipengaruhi oleh faktor biologis dan neurologis, seperti gangguan pada amigdala dan korteks prefrontal yang mengatur emosi dan kontrol moral. Dalam konteks emosional, individu dengan ASPD masih dapat merasakan emosi intens seperti marah atau frustrasi, sedangkan psikopat cenderung memiliki respons afektif yang datar dan tidak merasakan emosi mendalam, baik positif maupun negatif. Dari segi

penanganan, individu dengan ASPD masih memiliki peluang untuk berubah melalui intervensi perilaku yang intensif, sementara psikopat sangat sulit direhabilitasi karena kurangnya motivasi internal dan tidak adanya rasa bersalah terhadap perbuatannya. Dengan demikian, meskipun kedua gangguan ini sama-sama berhubungan dengan perilaku kriminal, psikopati mewakili bentuk yang lebih ekstrem dan berbahaya dari kepribadian antisosial karena menyentuh inti kemanusiaan—yaitu ketiadaan hati nurani dan empati.

2.4 Tipologi Kejahatan

Perilaku kriminal bersifat multifaktorial, artinya tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi dari berbagai aspek. Dalam kajian psikologi forensik, kekerasan atau perilaku kriminal yang melibatkan agresi dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu kejahatan instrumental (*instrumental violence*) dan kejahatan reaktif (*reactive violence*). Perbedaan ini penting untuk memahami motivasi pelaku, kondisi psikologis yang mendasari tindakan, serta penilaian tanggung jawab hukum dan risiko residivisme (pengulangan kejahatan).

a. Kejahatan Instrumental

Kejahatan instrumental adalah tindakan kekerasan atau kriminal yang dilakukan secara terencana dan bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu, baik bersifat materiil (seperti uang atau harta), psikologis (seperti kekuasaan, kontrol, atau status), maupun strategis (seperti menghilangkan saksi atau pesaing).

Ciri khas kejahatan ini adalah adanya perencanaan, kontrol diri yang relatif baik, dan tujuan yang jelas. Kekerasan di sini bukan tujuan utama, melainkan alat atau sarana (*instrument*) untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Karakteristik Psikologis Pelaku:

1. Pelaku mampu mengendalikan emosi dan bertindak dingin.
2. Empati rendah: pelaku tidak mempertimbangkan penderitaan korban.

3. Kognisi moral dangkal: menganggap korban hanya sebagai “objek” atau “rintangan.”

Tingkat psikopati tinggi: banyak pelaku kejahatan instrumental menunjukkan ciri-ciri psikopatik, seperti manipulatif, perhitungan, dan tanpa rasa bersalah.

Contoh Kasus:

1. Seorang pembunuh bayaran yang membunuh seseorang sesuai kontrak demi imbalan uang.
2. Pelaku perampokan bank yang melukai penjaga agar dapat melarikan diri dengan aman.
3. Seorang suami yang meracuni istrinya demi memperoleh warisan.
4. Kejahatan korporasi atau penipuan skala besar yang melibatkan manipulasi finansial tanpa kekerasan fisik langsung.

b. Kejahatan Reaktif

Kejahatan reaktif adalah bentuk kekerasan atau tindakan kriminal yang muncul sebagai reaksi emosional spontan terhadap suatu situasi yang memicu stres atau frustrasi intens. Tindakan ini biasanya tidak direncanakan (unplanned) dan digerakkan oleh emosi kuat seperti marah, takut, dendam sesaat, atau cemburu. Kekerasan dilakukan bukan karena pelaku menginginkan hasil tertentu (seperti uang atau kekuasaan), melainkan untuk menyalurkan atau melampiaskan emosi negatif yang sudah memuncak.

Kekerasan reaktif sering juga disebut “expressive violence”, karena tujuan utamanya adalah mengekspresikan emosi, bukan mencapai keuntungan eksternal. Reaksi ini biasanya terjadi spontan, eksplosif, dan kurang terkendali, sering kali dipicu oleh situasi yang dipersepsikan pelaku sebagai penghinaan, ancaman, atau ketidakadilan terhadap dirinya.

Secara psikologis, kejahatan reaktif berakar pada ketidakmampuan individu mengatur emosi (emotional dysregulation). Ketika seseorang merasa terancam, terhina, atau frustrasi, sistem emosionalnya—

khususnya amigdala di otak—menjadi sangat aktif. Jika individu tidak memiliki mekanisme pengendalian diri yang kuat, maka emosi tersebut dapat “meledak” dalam bentuk agresi fisik atau verbal.

Faktor Psikologis:

1. Impulsivitas tinggi: pelaku bertindak tanpa memikirkan konsekuensi.
2. Toleransi frustrasi rendah: mudah kehilangan kesabaran ketika menghadapi hambatan kecil.
3. Kesulitan mengelola kemarahan (anger management problems).
4. Harga diri rapuh: individu mudah merasa tersinggung atau dipermalukan.
5. Mekanisme pertahanan primitif: seperti proyeksi atau displacement, di mana kemarahan diarahkan pada orang lain yang tidak sepenuhnya terkait dengan penyebab emosi.

Dalam konteks ini, emosi adalah pendorong utama perilaku kriminal. Pelaku mungkin merasa “terpaksa” bertindak untuk memulihkan harga diri, menunjukkan kekuasaan, atau melindungi diri dari ancaman yang sebenarnya tidak nyata.

Dari sudut pandang neuropsikologi, kekerasan reaktif berkaitan dengan ketidakseimbangan antara dua sistem utama otak:

1. Sistem Limbik (terutama Amigdala):
Berperan dalam pemrosesan emosi, khususnya rasa takut, marah, dan ancaman. Pada pelaku reaktif, amigdala sering menunjukkan hiperaktivitas, membuat individu bereaksi berlebihan terhadap pemicu emosional kecil.
2. Korteks Prefrontal (Prefrontal Cortex):
Mengatur fungsi eksekutif seperti perencanaan, penilaian moral, dan pengendalian impuls. Pada pelaku reaktif, area ini sering tidak berfungsi optimal, sehingga gagal menahan dorongan agresif dari sistem limbik.

Dengan kata lain, emosi “menguasai” rasionalitas. Karena itu, tindakan kekerasan reaktif sering kali terjadi dalam hitungan detik, tanpa perencanaan atau pertimbangan moral.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol atau narkotika dapat menurunkan aktivitas prefrontal cortex, memperburuk impulsivitas, dan meningkatkan kemungkinan kekerasan reaktif.

Profil dan Karakteristik Psikologis Pelaku

Pelaku kejahatan reaktif memiliki profil khas yang membedakannya dari pelaku instrumental:

1. Impulsif dan mudah tersulut emosi.
2. Kesulitan mengendalikan marah, terutama dalam situasi interpersonal.
3. Reaktivitas tinggi terhadap provokasi.
4. Perasaan harga diri yang mudah terguncang.
5. Masih memiliki empati atau rasa bersalah setelah kejadian.
6. Cenderung menyesal dan bingung mengapa mereka bertindak demikian.

2.5 Rangkuman

Perilaku kriminal dipengaruhi oleh **empat faktor utama**, yaitu faktor biologis, psikologis, sosial–lingkungan, dan situasional. Dalam kaitannya dengan kondisi mental, terdapat **dua gangguan psikologis** yang paling sering berhubungan dengan perilaku kriminal, yakni Gangguan Kepribadian Antisosial (ASPD) dan psikopati. Dari sisi klasifikasi, perilaku kriminal agresif dibedakan ke dalam **dua tipologi kejahatan**, yaitu kejahatan instrumental yang bersifat terencana dan kejahatan reaktif yang dipicu oleh emosi. Pemahaman terhadap keempat faktor penyebab, dua gangguan psikologis, dan dua tipologi kejahatan ini menjadi dasar penting dalam kajian psikologi forensik untuk asesmen, pencegahan, dan intervensi perilaku kriminal.

2.6 Bahan Diskusi

1. Faktor mana yang menurut Anda paling dominan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan? Mengapa?
2. Bagaimana pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan?
3. Apakah seseorang dengan gangguan kepribadian antisosial atau psikopati dapat bertanggung jawab penuh atas tindakan kriminalnya?
4. Apa perbedaan signifikan antara kejahatan instrumental dan kejahatan reaktif, dan bagaimana perbedaan ini memengaruhi proses hukum maupun intervensi psikologis?
5. Menurut Anda, apakah perilaku kriminal lebih tepat dipahami sebagai “pilihan individu” atau sebagai “produk lingkungan dan kondisi psikologis”?

2.7 Feedback

1. Tidak ada satu faktor yang sepenuhnya dominan, karena perilaku kriminal bersifat multifaktorial. Namun, faktor psikologis dan sosial sering menjadi pemicu paling kuat karena berkaitan langsung dengan cara individu berpikir, mengelola emosi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor biologis dapat meningkatkan kerentanan, tetapi tanpa dukungan lingkungan dan pengalaman hidup tertentu, perilaku kriminal belum tentu muncul. Dengan kata lain, kejahatan biasanya terjadi ketika kerentanan individu bertemu dengan situasi dan lingkungan yang mendukung.
2. Pengalaman masa kecil, terutama yang melibatkan kekerasan, penelantaran, atau pola asuh tidak konsisten, dapat menghambat perkembangan empati, kontrol diri, dan regulasi emosi. Anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini berisiko mengembangkan pola pikir distorsif, agresivitas, serta kesulitan membedakan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut dapat membentuk kepribadian antisosial dan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal saat dewasa.

3. Secara umum, individu dengan Gangguan Kepribadian Antisosial atau psikopati tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena mereka mampu memahami perbedaan benar dan salah. Namun, dari sudut pandang psikologi forensik, gangguan tersebut memengaruhi kontrol impuls, empati, dan pembelajaran dari hukuman, sehingga perlu dipertimbangkan dalam asesmen risiko dan perencanaan intervensi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum tetap ada, tetapi pendekatan penanganannya memerlukan pertimbangan psikologis yang lebih mendalam.
4. Kejahatan instrumental bersifat terencana, rasional, dan bertujuan mencapai keuntungan tertentu, sedangkan kejahatan reaktif bersifat spontan dan dipicu oleh emosi intens. Dalam proses hukum, kejahatan instrumental sering dinilai memiliki unsur kesengajaan dan perencanaan yang lebih kuat, sehingga hukuman cenderung lebih berat. Sementara itu, kejahatan reaktif membuka ruang pertimbangan faktor emosional dan situasional. Dalam intervensi psikologis, pelaku reaktif lebih membutuhkan pelatihan regulasi emosi, sedangkan pelaku instrumental memerlukan pendekatan manajemen risiko dan kontrol perilaku jangka panjang.
5. Perilaku kriminal paling tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara pilihan individu dan pengaruh lingkungan serta kondisi psikologis. Individu tetap memiliki kehendak dan tanggung jawab atas tindakannya, namun pilihan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Lingkungan, pengalaman hidup, serta kondisi psikologis membentuk cara seseorang mengambil keputusan. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara tanggung jawab personal dan pemahaman konteks psikososial menjadi kunci dalam penanganan perilaku kriminal.

2.8 Refleksi

1. Setelah mempelajari faktor-faktor penyebab perilaku kriminal, faktor mana yang paling membuat Anda berpikir ulang tentang cara Anda memandang pelaku kejahatan? Mengapa?

2. Bagaimana pemahaman tentang pengaruh pengalaman masa kecil mengubah cara Anda melihat hubungan antara keluarga, pengasuhan, dan risiko kriminalitas?
3. Menurut refleksi pribadi Anda, sejauh mana lingkungan sosial dapat membentuk pilihan individu untuk melakukan atau tidak melakukan kejahatan?

2.9 Asesmen

Bagian 1: Deskripsi Kasus

- Deskripsikan riwayat pelaku kasus, dari terjadinya kasus belakangan ini sampai kehidupan di masa remaja / masa kecilnya.
- Deskripsi disusun dalam bentuk narasi/deskriptif
- Jika tidak diperoleh data riwayat masa lalu pelaku tsb, untuk keperluan pembelajaran, silahkan cari pendapat dokter / psikolog / ahli tentang riwayat masa lalu tokoh tersebut yang dipublikasikan media. Jika tetap tidak mendapatkan pendapat dari ahli silahkan buat asumsi riwayat masa lalu dari hasil pendapat tim dengan diberi keterangan kata “mungkin” atau “kemungkinan”.
- Nama pelaku cukup ditulis dengan **INISIAL** (jangan nama sebenarnya).
- Kasus **TIDAK BOLEH SAMA** antar kelompok

Bagian 2: Analisis Kasus Berdasarkan Teori Tipologi Kejahatan

- Jelaskan relevansi konsep tersebut dengan kasus Anda (sertai dengan bukti dalam kasusnya)
- Analisis bisa dari sudut pandang pelaku

Bagian 3: Analisis Kasus Berdasarkan Teori Tipologi Viktimologi/ Korban

- Jelaskan relevansi konsep tersebut dengan kasus Anda (sertai dengan bukti dalam kasusnya)
- Analisis dari sudut pandang korban

Bagian 4: Analisis Kasus Berdasarkan Teori Faktor Penyebab Kejahatan

- Jelaskan faktor penyebab kejahatan minimal 2 dan sertakan dengan argumentasinya.

Bagian 5: Analisis Kasus Berdasarkan Gangguan Mental/Perilaku Kriminal yang dimiliki

- Analisis kasus tersebut berdasarkan gangguan mental yang berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku. Sebutkan gejala dan bukti-bukti yang mendukung argumentasi kelompok. **(JIKA ADA)**
- Jelaskan dampak-dampak yang terjadi jika kasus tersebut dibiarkan terus menerus.

Bagian 6: Usulan Tindakan Penanganan terhadap Pelaku maupun Korban & Tindakan Preventif

- Jelaskan tindakan penanganan yang dapat dilakukan terhadap pelaku maupun korban (tindakan penanganan minimal 3)
- Jelaskan tindakan preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi (tindakan preventif minimal 3)

Bagian 7: Daftar Pustaka

- Sumber Teori, contoh:
Feist & Feist (2008) Theories of Personality. Seventh Edition. McGraw–Hill Primis.
- Sumber berita (nama majalah/berita online; tahun; judul artikel; tanggal artikel; link URL artikel.
- Boleh lebih dari satu sumber berita.

Luaran

Mahasiswa membuat laporan studi kasus

Referensi

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2019). Criminal behavior: A psychological approach (11th ed.). Pearson.
- Charles L. Yeschke. (2003). The Art of Investigating Interview. USA: Elsevier.
- Curt R. Bartol & Anne M. Bartol. (2017). Criminal Behavior: A Psychological Approach. England: Pearson Education.
- Ronald Roesch, Patricia A. Zapf, & Stephen D. Hart. (2010). Forensic Psychology and Law. USA: John Wiley & Sons.

2.10 Rubrik

Kriteria	Bobot	45-54.99	55-69.99	Mastery 70-84.99	85-100
Ketepatan analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Relevansi kasus dengan teori • Ketepatan teori yang digunakan • Keluasan teori yang digunakan • Daftar pustaka sesuai kaidah APA 	40%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2-3 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kedalaman analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborasi analisis kasus dengan teori • Kekuatan argumen • Kejelasan argumen dengan kasus 	40%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kontribusi individu dalam kelompok	20%	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.

BAB III

Metode Investigasi

Sub Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis metode investigasi dalam memeriksa bukti, saksi, korban, dan pelaku dalam kasus hukum.

Deskripsi Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar investigasi, interogasi, dan wawancara, termasuk perbedaannya, posisi interogasi dalam investigasi, serta perkembangan metode dan sejarah investigasi di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan wawancara investigasi secara profesional dan etis, termasuk tujuan, sasaran (saksi dan tersangka), serta prinsip non-koersif dan perlindungan HAM.
3. Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan psikologi kognitif dalam wawancara, khususnya melalui wawancara kognitif untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi kesaksian.
4. Mahasiswa mampu menganalisis dinamika psikologis terperiksa, meliputi mekanisme pertahanan diri, kebutuhan psikologis pelaku, perilaku berbohong, serta hambatan dalam proses wawancara.
5. Mahasiswa mampu mempraktikkan teknik komunikasi dan manajemen wawancara investigatif, termasuk teknik bertanya efektif, Conversation Management (CM), penyusunan ringkasan hasil, dan tindak lanjut secara sistematis serta menjaga kerahasiaan data.

Relevansi dengan Dunia Kerja

1. Membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis kasus dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang dibutuhkan di bidang psikologi, hukum, HR, dan kepolisian.

2. Mengembangkan kemampuan wawancara profesional dan etis yang relevan untuk profesi psikolog, HRD, auditor, legal officer, dan konsultan.
3. Melatih komunikasi strategis dan penggalan informasi akurat, penting dalam dunia kerja yang menuntut ketepatan dan akuntabilitas.
4. Menumbuhkan kepekaan terhadap etika dan HAM, sebagai standar kerja di organisasi modern.
5. Meningkatkan daya saing lulusan lintas sektor, karena keterampilan investigatif dan psikologis bersifat universal.

3.1 Definisi Investigasi dan Interogasi

Investigasi adalah pengumpulan informasi yang logis dan cerdas melalui penyelidikan dan pemeriksaan untuk tujuan mengembangkan bukti sehingga dapat memecahkan suatu masalah. Secara umum, investigasi seringkali dianggap sama dengan interogasi padahal kedua konsep tersebut memiliki pengertian yang berbeda meskipun keduanya sering dilakukan dalam konteks penyelidikan atau penegakan hukum.

Interogasi adalah proses pertanyaan yang diajukan oleh polisi kepada seseorang yang ditangkap atau dicurigai untuk mencari jawaban atas suatu tindak pidana. Dalam proses ini, setiap orang berhak untuk diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk memiliki penasihat yang hadir, dan konsekuensi dari jawabannya. Jika polisi gagal atau lalai memberikan peringatan ini, pertanyaan dan jawabannya tidak dapat diterima sebagai bukti di persidangan atau pemeriksaan orang yang ditangkap.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa interogasi merupakan salah satu bagian dari proses investigasi. Investigasi mencari kebenaran melalui berbagai sumber sedangkan interogasi berfokus pada perolehan informasi dari individu melalui proses tanya jawab.



Gambar 6. Ilustrasi Investigasi
 Sumber:
<https://www.garudasystrain.co.id/tahapan-penting-dalam-investigasi-insiden-keselamatan/>

Perbedaan antara Interogasi dan Wawancara

Baik interogasi maupun wawancara sama-sama melibatkan proses tanya jawab tetapi tujuan, suasana, dan pendekatannya sangat berbeda. Wawancara berorientasi pada kerjasama antara *interviewer* (pewawancara) dan *interviewee* (orang yang diwawancara) untuk mendapatkan pemahaman atau informasi sedangkan interogasi berorientasi pada pembuktian dan konfirmasi fakta dengan penekanan tertentu. Perbedaan kedua konsep tersebut dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Interogasi dan Wawancara

Aspek	Wawancara	Interogasi
Tujuan utama	Mengumpulkan informasi, opini, atau data dari narasumber secara terbuka dan sukarela.	Mendapatkan keterangan atau pengakuan, biasanya terkait pelanggaran, kejahatan, atau masalah tertentu.
Sifat komunikasi	Bersifat kooperatif - <i>interviewer</i> (pewawancara) dan <i>interviewee</i> (narasumber/orang yang diwawancara)	Bersifat konfrontatif - <i>interviewer</i> (pewawancara) menguji kebenaran jawaban atau informasi dari <i>interviewee</i> (orang yang diwawancara)

Proses	Tidak menyudutkan atau menuduh lawan bicara	Berjalan logis dan rasional
Suasana	Percakapan yang terjadi bersifat formal, santai, dan tidak ada ancaman	Percakapan yang terjadi bersifat sistematis dan mengejar pengakuan/kebenaran
Gaya pertanyaan	Terbuka, eksploratif, dan fleksibel; bisa mendorong <i>interviewee</i> bercerita panjang.	Tertutup, terarah, dan menekan; fokus pada kejelasan fakta dan inkonsistensi jawaban.
Hubungan <i>interviewer-interviewee</i>	Relatif setara	Hierarkis; <i>interviewer</i> memiliki otoritas atau kekuasaan lebih tinggi.



Gambar 7. Ilustrasi Wawancara

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20241203110643-561-1173175/5-tips-persiapan-wawancara-kerja-agar-sukses-dan-berjalan-lancar>

3.2 Metode Investigasi

Secara umum dalam perkembangannya, terdapat tiga jenis metode yang digunakan dalam proses investigasi yaitu:

1. Teknik kekerasan fisik langsung
Penyiksaan terhadap fisik, dengan cara memukul/meninju, membakar kulit dengan rokok, menggunakan sengatan listrik, dan sebagainya.
2. Teknik penyiksaan terselubung
Penyiksaan terhadap fisik namun tidak meninggalkan bekas. Cara-cara yang dilakukan dengan memasukkan kepala ke dalam air, berdiri selama berjam-jam, diikat dengan posisi tubuh yang terbalik, dan sebagainya. Teknik ini merupakan pengembangan dari teknik

kekerasan terhadap fisik secara langsung karena pengakuan yang terjadi di bawah tekanan tidak diakui/ tidak diterima di dalam pengadilan.

3. Teknik menggunakan pendekatan psikologis
Kekerasan/penyiksaan terhadap fisik sudah tidak dilakukan kembali karena ada pandangan bahwa seseorang adalah individu yang dapat menyampaikan informasi/kebenaran. Pendekatan ini dapat lebih diterima di pengadilan Amerika selama 30 tahun terakhir.

3.3 Sejarah Investigasi Kepolisian Indonesia

Terdapat beberapa rentang periode/masa perkembangan teknik investigasi yang berlaku di Kepolisian Indonesia.

1. Era kolonial (Sebelum tahun 1945)
Polisi kolonial menggunakan kekerasan secara langsung dan terbuka (pukulan, cambukan, kurungan) untuk menegakkan kekuasaan dan menakuti rakyat. Tujuan dari kekerasan fisik langsung tersebut bukan hanya untuk mencari kebenaran dari suatu tindakan pelanggaran hukum pidana melainkan juga untuk menjaga ketertiban dan menekan perlawanan politik. Pada era tersebut, kekerasan fisik langsung dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan masyarakat jajahan.
2. Era awal kemerdekaan (1945-1960an)
Pada era ini, institusi kepolisian nasional mulai terbentuk namun masih menggunakan metode interogasi kolonial. Dalam situasi politik yang tidak stabil (pemberontakan, agresi militer, dan lainnya) metode kekerasan langsung dan terselubung masih dianggap cara cepat untuk menggali informasi dari tahanan/tersangka pelanggaran hukum.
3. Era orde baru (1966-1998)
Pada era ini, interogasi kekerasan terselubung masih dianggap sebagai cara efektif untuk memperoleh pengakuan cepat terutama pada kasus-kasus kriminalitas yang besar.

4. Era reformasi (Pasca 1998)

Pada era ini, KUHP dan UU Polri mulai menegaskan bahwa pengakuan di bawah tekanan adalah tidak sah dan prinsip HAM mulai ditegakkan. Pelatihan wawancara non-koersif (seperti: PEACE model, cognitive interview (mulai diperkenalkan dalam lembaga institusi kepolisian. Teknik kekerasan langsung dan terselubung mulai bergeser ke teknik dengan pendekatan psikologis.

5. Era modern dan reformasi lanjutan (2010-an s/d sekarang)

Penggunaan alat-alat forensik, seperti rekaman audio-video dalam interogasi dan keterlibatan psikolog forensik mulai diterapkan dalam pemeriksaan kasus-kasus hukum. Profesionalisme dan humanisasi dalam proses penyidikan sejalan dengan nilai HAM dan akuntabilitas publik. Proses penyidikan mulai menerapkan empati, komunikasi, analitis perilaku tanpa ancaman/intimidasi.

3.4 Wawancara Investigasi

Proses wawancara bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan informasi untuk kemudian dapat menarik kesimpulan dari kumpulan fakta/informasi tersebut. Wawancara ditujukan kepada saksi atau pihak-pihak yang bukan menjadi tersangka suatu kejahatan serta juga dapat ditujukan kepada tersangka. Proses wawancara terhadap tersangka membutuhkan keterampilan yang lebih mendalam karena tersangka memiliki motif untuk menyembunyikan atau mengalihkan informasi dari kebenaran yang ada.

Definisi Wawancara Investigasi

Wawancara investigasi harus dilakukan dalam suasana yang profesional, artinya tidak ada perilaku kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang mendorong adanya pengakuan dari orang yang tidak bersalah. Dalam hal ini, investigator (orang yang melakukan proses investigasi) harus menerapkan metode pengumpulan bukti melalui berbagai prosedur seperti wawancara dan pengumpulan barang bukti dan dokumen.



Gambar 8. Ilustrasi Wawancara Investigasi

Sumber:

<https://kerja-safety.blogspot.com/2015/10/investigasi-kecelakaan-kerja-iii.html>

Etika dalam Wawancara Investigasi

Dalam melakukan proses investigasi, penting untuk memperhatikan etika sehingga dapat mengantisipasi mengalami kejadian sebagai berikut:

- Penyalahgunaan otoritas
- Penggunaan taktik interogasi
- Memperlakukan terperiksa seolah-olah bersalah
- Mengancam
- Pemaksaan
- Penyiksaan
- Tidak memberikan respek terhadap terperiksa
- Tidak menjaga martabat/kehormatan terperiksa

Tujuan Wawancara Investigasi

Tujuan utama dari wawancara investigasi adalah menemukan kebenaran. Oleh karena itu, perlu berfokus pada pengakuan dan kebenaran sehingga wawancara investigasi dapat dilakukan secara terstruktur/terorganisir dan dapat menggunakan teknik yang berbeda untuk mencari pengakuan (bahkan ada yang menggunakan kekerasan).

Dalam proses wawancara, ada tendensi untuk melakukan perilaku berbohong yang ditandai dengan ciri-ciri: adanya perubahan suara/intonasi tertentu saat menjawab; mengulur waktu sebelum menjawab; menggunakan hal detail/spesifik untuk berbohong;

memperdebatkan poin-poin yang sepele daripada membahas masalah nyata, memiliki taktik untuk berdebat (“*Anda tidak memahami kondisi saya*”).

Tersangka dan Saksi dalam Wawancara Investigasi

Segala sumber informasi berasal dari saksi dimana informasi tersebut dapat meringankan atau memberatkan tersangka dalam suatu kejahatan yang dilakukan. Tersangka memiliki motif untuk menyembunyikan atau menolak mengaku bersalah agar tidak mendapatkan hukuman.

3.5 Wawancara Kognitif

Wawancara kognitif diciptakan oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman. Tujuan dari wawancara kognitif adalah untuk meningkatkan proses *retrieval* yang akan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi dengan cara membuat saksi/korban merasa relaks, dan kooperatif. Proses penggalan informasi pada saksi dijelaskan secara tepat dengan menggunakan pendekatan psikologi kognitif.

Kebenaran Kesaksian

1. Perhatian

Proses seleksi terhadap semua informasi yang masuk pada suatu peristiwa disebut perhatian. Tidak semua informasi yang masuk akan diproses, sehingga informasi yang tidak diproses akan dibuang/dilemahkan perhatiannya.

2. Persepsi

Persepsi adalah pemberian makna terhadap informasi yang masuk. Pemberian makna dipengaruhi oleh pengetahuan, harapan, usia, emosi, serta budaya.

3. Memori

Memori berkaitan dengan kemampuan otak untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya. Memori merupakan salah satu fungsi kognitif utama yang memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Ada dua proses yang penting dalam penyimpanan memori, yaitu:

- *Encoding/ acquisition phase*

Encoding merupakan proses bagaimana suatu informasi masuk dalam memori. Tidak setiap informasi yang diperhatikan akan disimpan dalam ingatan, karena itu akan ada informasi yang dibiarkan menghilang begitu saja. Selain itu tidak semua informasi disimpan secara tepat. Dalam proses menyimpan informasi di memori, ada proses lupa yang dapat dialami oleh individu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan lupa pada seseorang:

- Faktor perhatian

Saat informasi dipaparkan, individu kurang memberikan perhatian. ini menandakan bahwa informasi tidak disimpan.

- Faktor *retrieval*/mengingat

Faktor kedua inilah yang sering terjadi. Individu sudah menyimpan, tetapi tidak bisa dimunculkan kembali.

- Tingkat stres pada individu

Stres dapat meningkatkan dan menurunkan ingatan individu.

- Peristiwa traumatis (seperti: kekerasan)

Memori individu akan lebih baik pada peristiwa yang bukan kekerasan dibanding peristiwa kekerasan.

- *Retrieval*

Retrieval merupakan proses informasi yang masuk dalam memori dapat dimunculkan/dipanggil kembali. Ingatan itu bersifat konstruktif. Jika seseorang melihat sebuah peristiwa maka informasi yang disimpan adalah peristiwa tersebut ditambahkan dengan informasi yang sebelumnya telah dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, informasi yang telah dimiliki dapat berpengaruh pada kesaksian. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses *retrieval*:

- Penarikan kesimpulan. Dalam memberikan kesaksian, saksi sering memberikan kesimpulan terhadap suatu peristiwa

yang dialaminya. Penyimpulan ini dapat benar, dapat juga bias

- *Stereotipe*. Dalam memahami lingkungannya, individu sering melakukan kategorisasi (usia, jenis kelamin, ras, penampilan)
- *Kondisi Emosi*. Saksi dalam kondisi emosi (takut, cemas, marah) maka ketepatan kesaksiannya akan menurun.

Prinsip Dasar Wawancara Kognitif

Memori disusun secara tumpang tindih/*overlap* dengan peristiwa yang disimpan/*encoded*, maka diperlukan teknik penggalan yang khusus. Terdapat berbagai cara untuk mengingat atau mengakses kembali informasi yang disimpan. Namun, bisa saja satu cara tidak efektif namun cara lain lebih efektif untuk mengingat kembali informasi yang sudah disimpan.

Tahapan Wawancara Kognitif

Tahapan dalam melakukan wawancara kognitif adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan

Dalam tahap persiapan, pewawancara perlu memastikan bahwa kesan pertama adalah kesan yang menyenangkan bagi orang yang diwawancara. Oleh karena itu, sebelum memulai wawancara perlu memastikan tempat/ruangan yang digunakan cukup nyaman dan memadai. Prinsip utama yang perlu diperhatikan pada tahap awal ini adalah waktu yang cukup, sasaran informasi yang ingin diperoleh jelas, prioritas yang disampaikan dalam percakapan, dan pengenalan subjek/klien cukup baik.

Pada saat proses wawancara, kontak mata perlu dijaga. Artinya, pewawancara memandang dengan pandangan yang netral dan jangan bertanya sambil melakukan kegiatan yang lain (misalnya: bermain gawai atau sambil mengetik). Pewawancara perlu menjaga agar jarak duduk dengan orang yang diwawancara tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh karena biasanya manusia memiliki jarak yang

membuatnya merasa nyaman. Oleh karena itu, biasanya menggunakan *proxemics*, yaitu memperhatikan jarak *personal* (kurang lebih batasnya selengan). Jarak *personal* yang terlalu dekat dapat membuat orang yang diwawancara mengalami stres (Argyle, dalam Milne & Bull, 2000). Posisi duduk akan lebih baik jika 120 derajat seperti posisi jam 10 dan jam 2. Posisi berhadapan sering membuat tidak nyaman.

2. Membangun *Rapport*

Tahap membangun *rapport* (pendekatan) terhadap saksi/korban sangat penting agar mereka tidak cemas, merasa nyaman, serta membuat saksi/korban juga menjadi lebih konsentrasi dengan pertanyaan yang diajukan. Pada tahap ini, pewawancara juga perlu membina hubungan dengan menciptakan suasana aman dan nyaman bagi orang yang diperiksa serta menciptakan kesan positif dan berwibawa. Oleh karena itu, pewawancara perlu memeriksa penampilannya sebelum melakukan wawancara; mengucapkan salam kepada orang yang diperiksa, memberikan jabat tangan, dan tersenyum; bersikap ramah dan tulus; bersikap wajar terhadap orang yang diperiksa dengan menanyakan kenyamanan orang yang diperiksa dan memastikan mereka duduk senyaman mungkin.

3. Menjelaskan tujuan interview

Manusia pada dasarnya tidak suka dengan sesuatu yang mengejutkan maka sebaiknya sebelum memulai wawancara, perlu menjelaskan tujuan dari wawancara itu sendiri. *Interviewer* perlu menjelaskan bahwa interview ini membutuhkan ingatan subjek dan memerlukan bantuannya untuk berkonsentrasi mengingat. *Interviewee* akan diberikan waktu yang cukup untuk mengingat. Sebaiknya pada satu *interview*, subjek diwawancara oleh 1 orang. Berdasarkan penelitian, subjek akan tidak fokus pada saat diinterview oleh lebih dari 1 orang. *Interviewer* perlu berperan sebagai fasilitator untuk membantu *interviewee* mengingat peristiwa yang dialami karena mereka yang hadir pada saat kejadian sehingga mereka yang paling tahu dan memiliki banyak informasi. Oleh karena itu,

memberikan ruang untuk berkonsentrasi dan jeda waktu yang cukup akan membantu interviewee untuk mengingat.

4. Melaporkan/menceritakan apapun

Interviewer mendorong saksi untuk menceritakan apapun secara detail dari kejadian karena saksi sering merasa bahwa apa yang disampaikannya bukan hal penting, atau ia tidak dapat mengingat secara lengkap. Oleh karena itu, *interviewer* memberikan instruksi yang menenangkan interviewee bahwa ia dapat menceritakan apapun tanpa merasa terancam.

Pada tahap ini, terjadi *context reinstatement*, yaitu mengingat kembali situasi dimana peristiwa terjadi. Subjek diminta mengingat kembali situasi fisik dan kondisi internal dirinya, misalnya membayangkan kejadian dimana peristiwa itu terjadi; lokasinya dimana; tempat itu seperti apa; dimana posisi subjek pada saat itu; apa yang dirasakan dan dipikirkan; reaksi dari subjek; dan sebagainya. Subjek juga diminta mengingat sensori yang terjadi, seperti bau di tempat kejadian seperti apa; suhunya panas atau dingin; suara apa yang mengganggu di sana; dan sebagainya.

Pada tahap ini, *interviewer* dapat memberikan instruksi:

“Silahkan anda membayangkan kembali peristiwa yang anda lihat. Anda boleh menutup mata jika itu memudahkan anda untuk mengingat.”

“Bayangkan Anda berada kembali pada saat itu. Seperti apa situasinya, kondisi ruangnya, posisi anda di ruangan itu. Ceritakan apa yang anda lakukan dengan detil!”

“Apa yang dapat anda cium saat itu ? Apa yang Anda dengar ? Anda lihat ? Atau yang anda rasakan dari suhu di ruangan tersebut ?”

5. Probing

Tahap melakukan *probing* (penggalan informasi secara lebih detail) pada gambaran dan hal-hal yang disampaikan oleh saksi. Tujuannya

agar diperoleh keyakinan atas hal-hal yang relevan terkait dengan peristiwa yang dialami oleh saksi, karena itu ia harus berkonsentrasi. Pada tahap ini, interviewer dapat menggunakan panduan 5W+1H (*What, Who, Where, When, Why, dan How*). Instruksi yang dapat diberikan sebagai berikut :

- *“Anda tadi menyebut tentang pelaku. Coba anda menutup mata dan membayangkan pelaku.”*
- *“Kapan anda bisa melihat gambaran pelaku secara jelas ?”*
- *“Ceritakan seperti apa perawakannya ?”*
- *“Ia menggunakan baju apa ?”*
- *“Apakah ada bau yang anda cium dari dia ?”*
- *“Apa ia mengatakan sesuatu ?”*
- *“Kalau anda sudah mendapatkan gambaran tentang dia, ceritakan sebanyak mungkin informasi yang bisa Anda sampaikan!”*

6. Mengulang ingatan dengan berbagai cara dan urutan yang berbeda

Tahap ini merupakan tahap yang penting karena subjek diminta untuk mengingat kejadian dengan berbagai cara dan berbagai urutan waktu. Biasanya subjek mengingat dengan urutan dari awal ke akhir kejadian. Setelah melakukan hal ini, mintalah subjek untuk mengingat secara terbalik. Lalu subjek diminta memulai dari bagian yang paling diingat ke bagian akhir, dari bagian tengah ke akhir, dari bagian tengah ke bagian awal. Interviewer dapat memberikan instruksi sebagai berikut :

“Jadi anda sudah menyampaikan cerita secara lengkap dari awal hingga akhir. Untuk membantu anda mengingat maka anda diminta saat ini menceritakan ulang cerita anda tadi dari akhir sampai awal. Jangan sampai ada yang terlewatkan.”

7. Merangkum

Proses merangkum adalah hal yang penting agar tidak melewatkan informasi yang penting. Dalam merangkum upayakan menggunakan

kata-kata yang digunakan oleh subjek dan memberikan izin kepada subjek untuk menambah informasi baru jika dirasa perlu.

8. Penutup

Interview sebaiknya ditutup dengan baik sehingga menimbulkan kesan yang positif pada subjek. Interviewer secara bertahap masuk ke dalam topik pembicaraan yang netral seperti di awal di tahap *rapport*. Pada bagian penutup, data demografi subjek dapat digali. Interviewer perlu mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan atas usahanya bekerja keras berkonsentrasi dan mengingat kejadian yang dialaminya.

3.6 Teknik Wawancara Investigasi Saksi & Tersangka

Proses pemeriksaan mempengaruhi perilaku terperiksa dimana proses tersebut bisa memunculkan kondisi frustrasi pada tersangka maupun saksi. Terdapat tiga jenis bentuk frustrasi, yaitu:

1. Frustrasi dalam bentuk agresi fisik maupun verbal
2. Frustrasi dalam bentuk penarikan diri, seperti perilaku diam, menolak bicara, dan menghindar.
3. Frustrasi dalam bentuk kecemasan, seperti reaksi takut, khawatir/cemas, serta mengeluhkan sakit fisik.

Interviewer perlu memahami dinamika psikologis dari terperiksa, yaitu perilaku apa yang sering muncul baik pada tersangka maupun saksi dalam sebuah pemeriksaan. Interviewer perlu mengetahui mekanisme pertahanan diri yang dimunculkan oleh tersangka sebagai berikut :

1. Mekanisme pertahanan diri yang bersifat neurotik: penyangkalan, menarik diri, represi, reaksi formasi, regresi.
 - Penyangkalan: menolak mengakui realitas atau fakta yang menimbulkan kecemasan.
Contoh: tersangka kasus KDRT menolak mengaku bahwa ia telah memukul pasangannya dengan berkata “*Saya tidak pernah menyentuh dia! Itu semua bohong,*” Padahal ada bukti medis dan

saksi yang menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan KDRT

- Menarik diri: menjauh atau menghindari situasi atau orang yang menimbulkan tekanan emosional.
Contoh: Korban kekerasan seksual menolak datang ke sidang atau bertemu pelaku karena takut dan malu, sehingga menarik diri dari proses hukum.
- Represi: secara tidak sadar menekan pikiran, ingatan, atau dorongan yang menyakitkan agar tidak muncul ke kesadaran.
Contoh: Korban tidak mampu mengingat detail kejadian kekerasan yang pernah dialaminya karena memori tersebut direpresi ke alam bawah sadarnya.
- Reaksi formasi: menunjukkan perilaku atau sikap yang berlawanan dengan perasaan sebenarnya untuk menutupi dorongan yang tidak diterima.
Contoh: Seorang tersangka yang membenci korban justru berbicara dengan sangat manis dan simpatik di pengadilan untuk menutupi rasa bencinya.
- Regresi: kembali pada pola perilaku yang lebih kekanak-kanakan ketika menghadapi stres atau ancaman.
Contoh: Pelaku kejahatan yang terpojok dalam interogasi tiba-tiba menangis dan bersikap seperti anak kecil.



Gambar 9. Ilustrasi Mekanisme Pertahanan Represi

Sumber:

<https://helohehat.com/mental/mental-lainnya/represi/>

2. Mekanisme pertahanan diri yang bersifat *immature*: acting out, proyeksi, rasionalisasi, agresi pasif, somatisasi.
- *Acting out* : menyalurkan konflik atau emosi yang tidak disadari melalui tindakan impulsif tanpa memikirkan konsekuensi.
Contoh : Narapidana memukul petugas setelah menerima vonis, karena tidak mampu menyalurkan kemarahan secara verbal.
 - Proyeksi : menyalahkan orang lain atas pikiran, perasaan, atau dorongan yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri.
Contoh : Pelaku penipuan menuduh korban “serakah” dan “memancing penipuan yang dilakukannya,” padahal motif utamanya adalah keuntungan pribadi.
 - Rasionalisasi : membuat alasan logis atau masuk akal untuk menutupi kegagalan atau perilaku yang tidak dapat diterima.
Contoh : Seorang koruptor mengatakan
“Saya tidak mencuri, saya hanya mengambil bagian saya dari proyek. Semua orang juga dapat bagian.”
 - Agresi pasif : menunjukkan kemarahan atau penolakan secara tidak langsung melalui sikap pasif atau tindakan yang menyabotase.
Contoh : Narapidana tidak mau bekerja sama dalam asesmen psikologis, menjawab dengan lambat atau acuh untuk menunjukkan perlawanan halus.
 - Somatisasi : menyalurkan konflik psikologis atau emosi yang tidak terselesaikan dalam bentuk keluhan fisik.
Contoh : Tersangka tiba-tiba merasa pingsan atau mengeluh sakit kepala setiap kali sesi interogasi dimulai.



Gambar 10. Ilustrasi Mekanisme Pertahanan Acting Out

Sumber:

<https://hellosehat.com/mental/stres/pertahanan-diri-emosi-negatif/>

3. Mekanisme pertahanan diri yang bersifat patologik: proyeksi delusional, konversi, dan distorsi.
 - Proyeksi delusional : menyandarkan pikiran atau perasaan yang tidak realistis kepada orang lain dalam bentuk keyakinan yang salah (delusi).
Contoh : Klien psikotik yakin jaksa dan hakim bersekongkol untuk membunuhnya.
 - Konversi : mengubah konflik atau tekanan emosional menjadi gejala fisik yang nyata (bukan berpura-pura).
Contoh : Korban kekerasan mengalami kelumpuhan sementara tanpa sebab medis
 - Distorsi : mengubah persepsi terhadap kenyataan agar sesuai dengan kebutuhan atau fantasi diri, sering kali disertai halusinasi atau delusi.
Contoh : Tersangka pembunuhan yakin bahwa tindakannya atas “perintah Tuhan”.

3.7 Kebutuhan Terdakwa/Pelaku Tindakan Kriminal

Terdapat tiga jenis kebutuhan utama terdakwa/tersangka perilaku kejahatan, yaitu:

1. Kebutuhan akan rasa aman (*Control*)

Kebutuhan ini berkaitan dengan rasa aman, stabilitas, dan kendali atas lingkungan maupun diri sendiri. Individu dengan kebutuhan kontrol yang tinggi merasa mampu menentukan nasibnya sendiri,

tidak diatur orang lain, dan menolak keadaan yang membuatnya merasa tak berdaya. Banyak pelaku kejahatan berusaha mengembalikan perasaan berkuasa yang hilang dalam hidupnya, misalnya karena pengalaman ditindas, diabaikan, atau kehilangan status sosial. Perilaku agresif, dominatif, atau manipulatif sering muncul sebagai kompensasi terhadap perasaan tidak berdaya.

2. Kebutuhan akan afiliasi, perasaan memiliki, diakui (*Belonging*)

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok, diterima, diakui, dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini berakar pada keinginan manusia untuk tidak sendirian dan memiliki identitas sosial yang bermakna.

Beberapa pelaku kejahatan termotivasi oleh keinginan untuk diterima dalam kelompok tertentu, seperti geng, komunitas kriminal, atau bahkan kelompok ideologis. Kebutuhan akan pengakuan sosial dapat membuat individu melanggar norma demi mendapatkan status, rasa hormat, atau solidaritas.

3. Kebutuhan akan kedekatan, kasih sayang, cinta, penerimaan dari lingkungan (*Intimacy*)

Kebutuhan ini mencerminkan keinginan untuk memiliki hubungan yang hangat, dekat, dan penuh kasih sayang dengan orang lain dimana individu merasa dicintai, diterima, aman secara emosional.

Beberapa pelaku melakukan kejahatan karena kebutuhan akan kedekatan emosional yang salah arah, misalnya mencari kasih sayang melalui cara yang manipulatif dan agresif hingga menyakiti orang lain. Pelaku pelecehan seksual atau kekerasan terhadap pasangan sering kali berakar dari rasa takut kehilangan hubungan intim atau keputusan karena penolakan.

3.8 Pelanggaran Etika dalam Investigasi Terperiksa

Terdapat berbagai pelanggaran etika yang dapat muncul dalam proses investigasi terperinci, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang/otoritas
Terjadi ketika pemeriksa menggunakan kekuasaan atau kedudukan untuk kepentingan pribadi, politik, atau emosional, bukan demi keadilan.
2. Memperlakukan terperiksa seolah-olah bersalah, tanpa adanya respek/penghargaan terhadap hak-haknya hingga mempengaruhi kondisi kejiwaannya.

Pemeriksa bersikap bias sejak awal, menganggap individu yang diperiksa pasti bersalah sebelum bukti dan proses pembuktian hukum dilakukan.
3. Mengancam, memaksa, menyiksa
Melibatkan intimidasi fisik atau psikologis untuk memperoleh pengakuan. Ini termasuk tindakan kekerasan langsung (memukul, menendang) maupun terselubung (memaksa berdiri lama, tidak memberi makan, menekan secara verbal).
4. Memberikan janji-janji yang tidak realistis/ilegal
Pemeriksa menjanjikan sesuatu di luar kewenangannya untuk memanipulasi keterbukaan terperiksa.
5. Tidak menjaga martabat/kehormatan terperiksa
Melibatkan tindakan memperlakukan, menghina, atau memperlakukan individu secara tidak manusiawi selama proses pemeriksaan.
6. Memenjarakan orang tidak bersalah (menyesuaikan UU/Hukum yang berlaku)
Menahan atau menghukum individu tanpa dasar hukum yang sah, atau karena manipulasi bukti dan pengakuan palsu.
7. Memaksakan melakukan hal-hal di luar kewenangan pemeriksa
Pemeriksa melampaui batas peran profesionalnya, misalnya psikolog bertindak seperti penyidik, atau penyidik memaksakan pemeriksaan medis tanpa izin.

Teknik Psikologi Wawancara Investigasi

Pemeriksa bertugas untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyidik/pemeriksa dalam menggunakan berbagai metode investigasi. Metode investigasi yang umum dipakai adalah observasi dan wawancara serta *conversation management*. Pemeriksa harus terampil memanfaatkan berbagai teknik bertanya; mampu mempersuasi tersangka untuk menjawab jujur; mampu menjaga kondisi psikologis tersangka; mampu menghadapi situasi apapun untuk keberhasilan wawancara investigasi dan mendapatkan kebenaran; merespon kemarahan/agresivitas; merespon kebohongan; merespon perilaku tidak kooperatif.

3.9 Keterampilan Interviewer

Terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pemeriksa dalam melakukan wawancara, antara lain :

1. Membangun *rapport*

Membangun *rapport* berarti menciptakan hubungan saling percaya, aman, dan kooperatif antara pemeriksa dan terperiksa. Tujuannya agar individu yang diperiksa merasa nyaman, dihargai, dan bersedia membuka diri secara jujur tanpa rasa takut dihakimi. Oleh karena itu, pemeriksa perlu berkonsentrasi dan memberikan atensi pada setiap informasi yang diberikan oleh terperiksa. Selain itu, pemeriksa perlu memiliki ketegasan dan sabar dalam menggali informasi yang diperlukan dari terperiksa (saksi dan tersangka) serta juga menunjukkan sikap menerima bukan mengintimidasi.

2. Mendengarkan aktif

Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman, bukan sekadar mendengar kata-kata. Pemeriksa harus menangkap makna verbal dan nonverbal dari pernyataan terperiksa. Mendengarkan aktif dapat ditunjukkan dari gestur dan gerakan tubuh yang selaras; postur tubuh yang terbuka; intonasi suara yang stabil; ekspresi wajah yang sesuai; kontak mata yang menunjukkan ketertarikan dan menghargai lawan

bicara; dan *positive silence* (diam yang bermakna untuk memberi ruang untuk berpikir).



Gambar 11. Ilustrasi Mendengarkan Aktif

Sumber:

<https://www.kompasiana.com/agungmsgghai-edumain6203/66acb3c8c925c40fdc3e4902/mendengarkan-aktif-keterampilan-utama-untuk-membangun-hubungan-harmonis-dengan-remaja>

Terdapat lima aspek lain yang perlu dimiliki oleh pemeriksa dalam melakukan wawancara, sebagai berikut :

1. *Attitude* (Sikap)

Sikap profesional dan etis merupakan fondasi utama dalam proses wawancara. Pewawancara harus menunjukkan sikap respek, empati, objektif, dan netral tanpa memihak atau menghakimi pihak manapun.

2. *Flexibility* (Fleksibilitas)

Fleksibilitas adalah kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan atau strategi dalam mewawancarai dengan situasi, kepribadian, dan kondisi (fisik dan emosional) dari terperiksa. Pewawancara perlu memahami bahwa tidak semua wawancara menggunakan teknik/cara yang sama.

3. *Curiosity* (Rasa Ingin Tahu)

Rasa ingin tahu yang positif membuat pewawancara memiliki motivasi yang sehat untuk memahami peristiwa dari berbagai perspektif. Bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk mencari kebenaran secara objektif.

4. *Intuition* (Intuisi)

Intuisi adalah kemampuan untuk menangkap isyarat nonverbal atau hal-hal tersembunyi yang tidak langsung disampaikan oleh terperiksa secara verbal. Pewawancara perlu memiliki kepekaan dan

pemahaman yang komprehensif mengenai perilaku manusia sehingga dapat menyadari jika ada ketidakkonsistenan yang ditampilkan antara kata-kata verbal dan perilaku dari terperiksa.

5. *Analytical Thinking* (Berpikir Analitis)

Kemampuan berpikir analitis membantu pewawancara untuk menyusun, menilai, dan membuat benang merah dari setiap informasi yang diberikan selama proses wawancara. Pewawancara tidak hanya mendengar tetapi juga menganalisis konsistensi dan alur informasi yang disampaikan.

3.10 Wawancara dan Observasi

Dalam wawancara, interviewer perlu menggunakan pendekatan 5W + 1H (*What, Why, When, Where, Who* dan *How*). Namun, interviewer perlu berhati-hati dengan pertanyaan "*why*" karena pertanyaan tersebut dapat mendorong rasionalisasi atau pembenaran diri; cenderung menghakimi karena terasa seperti tuduhan; serta menimbulkan rasa bersalah, malu, takut bagi saksi atau korban.

Terdapat dua jenis pertanyaan yang digunakan dalam wawancara, yaitu :

1. *Open Ended Question* (Pertanyaan Terbuka)

Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberi ruang bagi responden untuk menjawab secara bebas dan luas, menggunakan kata-katanya sendiri. Pertanyaan ini tidak mengarahkan jawaban, melainkan mendorong eksplorasi, deskripsi, dan refleksi yang lebih dalam. Contoh :

"Bagaimana perasaan Anda saat itu?"

"Mengapa Anda memilih untuk melakukan hal tersebut?"

"Apa yang Anda pikirkan ketika situasi itu terjadi?"

2. *Close Ended Question* (Pertanyaan Tertutup)

Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang membatasi pilihan jawaban, biasanya hanya "ya/tidak," atau memilih dari beberapa alternatif yang sudah ditentukan. Contoh :

"Apakah Anda berada di lokasi kejadian?"

“Apakah Anda mengenal korban sebelumnya?”

“Apakah Anda pernah bertemu dengan saksi sebelumnya?”

Jenis-Jenis Pertanyaan dalam Wawancara Investigasi

Terdapat beberapa jenis pertanyaan yang bisa digunakan dalam wawancara investigasi, yaitu :

1. The Narration Question

Pertanyaan jenis ini mendorong terperiksa untuk menceritakan peristiwa secara bebas dan lengkap, tanpa banyak intervensi dari pemeriksa. Jenis pertanyaan ini membantu mengumpulkan informasi awal yang kaya. Ciri dari pertanyaan ini adalah bersifat terbuka, mengundang untuk bercerita panjang, dan biasa digunakan pada tahap awal setelah *rapport* terbentuk. Contoh: *“Ceritakan kepada saya apa yang terjadi pada malam itu dari awal hingga akhir.”*

2. The “Who” Question

Pertanyaan tipe ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa, dimana hal ini penting untuk keperluan pembuktian hukum dan pemetaan hubungan antar pihak. Ciri dari pertanyaan ini adalah fokus pada identitas, peran, dan hubungan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa serta bersifat faktual. Contoh: *“Siapa yang berada di lokasi kejadian selain Anda?”*

3. The “Verification” Question

Pertanyaan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran, kejelasan, atau konsistensi informasi yang telah diberikan sebelumnya oleh terperiksa. Ciri dari pertanyaan ini adalah bersifat klarifikasi serta fokus pada detail informasi yang disampaikan (waktu, tempat, urutan kejadian). Pertanyaan ini harus disampaikan dengan intonasi yang netral sehingga tidak terkesan mengintimidasi atau menjebak. Contoh: *“Apakah benar yang Anda maksud dengan ‘ruangan belakang’ adalah ruang gudang?”*

4. The “Approach” Question

Pertanyaan ini digunakan untuk menggali cara atau strategi yang digunakan oleh tersangka atau pihak terkait dalam menjalankan tindakan tertentu. Ciri dari pertanyaan ini adalah menggali bagaimana tindakan dilakukan. Contoh: *“Bagaimana Anda mendekati korban sebelum kejadian terjadi?”*

5. *The “Thoughts” Question*

Pertanyaan ini mengeksplorasi apa yang dipikirkan oleh terperiiksa sebelum, selama, dan setelah kejadian terjadi. Pertanyaan ini membantu untuk memahami *state of mind* atau motivasi dari pelaku (*mens rea*). Ciri dari pertanyaan ini adalah menggali aspek kognitif terperiiksa (proses berpikir). Contoh: *“Apa yang ada di pikiran Anda ketika memutuskan untuk melakukan hal itu?”*

6. *The “Willingness” Question*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai seberapa sadar dan sukarela individu melakukan tindakan tertentu. Pertanyaan ini membantu membedakan apakah tindakan dilakukan karena tekanan/paksaan atau kehendak pribadi. Contoh: *“Apakah Anda merasa memiliki pilihan lain saat itu?”*

7. *The “Consequences” Questions*

Pertanyaan ini menggali sejauh mana individu memahami dampak dari tindakannya. Pertanyaan ini membantu untuk menilai aspek empati dan moral dari individu. Contoh: *“Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui akibat dari perbuatan itu?”*

8. *The “Why It Happened” Question*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menelusuri latar belakang atau penyebab yang mendasari terjadinya suatu tindakan tertentu. Jenis pertanyaan ini harus digunakan dengan hati-hati karena bisa menimbulkan kesan menyalahkan/mengintimidasi ataupun menjebak. Ciri pertanyaan ini bersifat eksploratif untuk menggali motif tersangka dan dapat digunakan ketika *rapport* sudah terbentuk. Contoh: *“Apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk melakukan hal itu?”*

Hambatan dalam Wawancara

Pewawancara bisa mengalami berbagai hambatan dalam melakukan proses wawancara, antara lain :

1. Evaluasi terlalu awal

Pewawancara terlalu cepat dalam menilai atau menafsirkan jawaban yang disampaikan oleh pemeriksa sebelum memperoleh informasi yang lengkap. Hal ini biasanya muncul karena keinginan untuk segera menuntaskan proses wawancara sehingga bisa berdampak adanya informasi penting yang hilang atau belum tergali serta terperiksa menjadi defensif karena merasa dihakimi.

2. Bermain dengan asumsi sendiri/prasangka

Pewawancara membawa prasangka atau asumsi pribadi ke dalam proses wawancara, misalnya gender, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Hal ini berdampak terhadap pewawancara cenderung hanya mendengar hal yang memperkuat pandangannya saja sehingga informasi menjadi bias dan terperiksa menjadi tidak dipercaya. Contoh: pemeriksa berasumsi bahwa “laki-laki lebih agresif” sehingga semua perilaku yang agresif dari terperiksa laki-laki diartikan sebagai kekerasan.

3. Kecenderungan untuk cepat mengambil kesimpulan

Pewawancara terlalu cepat dalam menarik kesimpulan tanpa menguji kembali konsistensi informasi atau bukti-bukti yang ada. Hal ini biasanya muncul karena waktu yang terbatas atau adanya keinginan untuk segera menyelesaikan kasus. Dampak dari tindakan ini adalah analisis pewawancara menjadi dangkal dan tidak akurat serta kesalahan interpretasi.

4. Menebak jauh ke depan

Pewawancara berupaya untuk menebak motif dari terperiksa tanpa dasar yang kuat sehingga kesimpulan yang diambil lebih berdasarkan intuisi yang berlebihan daripada fakta. Hal ini dapat berdampak terhadap arah wawancara yang salah dan kesimpulan yang tidak objektif.

5. Tidak memperhatikan

Pewawancara tidak memusatkan perhatian secara penuh terhadap proses wawancara yang dilakukan. Biasanya muncul karena pewawancara mengalami kelelahan, tergesa-gesa, atau sedang melakukan aktivitas lain sambil wawancara (misalnya: bermain gawai atau sambil mengetik). Tindakan ini dapat berdampak terhadap adanya informasi penting yang terlewat serta terperiksa juga merasa diabaikan/tidak dihargai.

3.11 Metode *Conversation Management* (CM)

Conversation Management (CM) merupakan metode bagi polisi dalam berkomunikasi dengan tersangka, korban, saksi, dan pihak lainnya yang terlibat dalam suatu kejadian kriminalitas. Penemu metode CM ini adalah Eric Shephred pada tahun 1983 ketika ia memberikan pelatihan kepada polisi di Inggris. Metode CM kemudian dikembangkan oleh kolega Shephred dan dipatenkan sebagai teknik interview investigasi di Inggris

Tahapan *Conversation Management* (CM)

Secara umum, terdapat tiga tahap utama dalam melakukan *Conversation Management* (CM), yaitu :

1. *Pre- interview behavior*

Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan persiapan sebelum proses wawancara dimulai. Tujuan utamanya adalah memastikan pewawancara sudah siap secara etis, psikologis, dan kompetensi untuk melakukan wawancara.

2. *Within interview behavior*

Tahap ini mencakup seluruh proses wawancara antara pewawancara dan terperiksa. Fokusnya pada bagaimana pewawancara membangun rapport, mengajukan pertanyaan, dan menjaga dinamika komunikasi yang efektif dan etis.

3. *Post interview behavior*

Tahap ini dilakukan setelah proses wawancara selesai dimana pewawancara melakukan refleksi, analisis, dan dokumentasi hasil wawancara.

Tahap *Pre-Interview*

Tahap pre-interview merupakan tahapan pertama dan paling krusial dalam *Conversation Management (CM)*. Kualitas hasil wawancara sangat ditentukan oleh bagaimana pewawancara merencanakan, menilai, dan mempersiapkan diri pada tahap awal ini. Pada tahap ini, pewawancara belajar mengenali cara berpikirnya, menata emosinya, serta merancang pendekatan yang etis dan efektif untuk memperoleh informasi.

Sebelum wawancara dimulai, pewawancara harus memahami bahwa setiap individu membawa kerangka berpikir dan bias pribadi yang dapat mempengaruhi proses wawancara. Cara seseorang memandang kasus, menafsirkan perilaku terperiksa, bahkan menyusun pertanyaan, sering kali dipengaruhi oleh perspektif/cara pandang yang sudah terbentuk. Pewawancara yang terlalu kaku dan tidak fleksibel serta kurang terbuka terhadap informasi baru akan mudah terjebak pada kesimpulan yang keliru. Biasanya, ia hanya memperhatikan data yang sesuai dengan prasangka awalnya dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Sikap seperti ini dapat menurunkan objektivitas dan menghambat pencarian kebenaran. Oleh karena itu, pewawancara harus memiliki **pikiran yang terbuka** dan **sikap fleksibel**. Ia harus siap menerima bahwa informasi yang muncul bisa saja berbeda dari ekspektasi awal, dan tetap mempertahankan profesionalitas dalam mengolah data tersebut.

Teknik Hidden Persuaders

Salah satu prinsip penting dalam tahap *pre-interview* adalah memahami bahwa terperiksa adalah **manusia yang memiliki kebutuhan dasar**, seperti kebutuhan akan rasa aman, penghargaan, dan didengarkan. Prinsip ini melahirkan suatu strategi/teknik dalam membangun kepercayaan melalui pendekatan empatik dan menghargai martabat

individu, bukan dengan tekanan atau ancaman yang disebut dengan teknik *hidden persuaders*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara **membangun dan memelihara rapport**, yaitu hubungan yang hangat, terbuka, *non-judgemental* dan dipercaya. *Rapport* tidak hanya dibangun di awal wawancara, tetapi harus dijaga sepanjang interaksi. Pewawancara perlu menunjukkan **sikap hangat, peka, empatik, respek, dan tulus** agar terperiksa merasa aman untuk membuka diri.

Selain itu, pewawancara perlu menggunakan **metode yang fleksibel**. Tidak semua kasus dapat ditangani dengan cara yang sama; pendekatan harus disesuaikan dengan karakter dan kondisi psikologis orang yang diwawancarai (tersangka, saksi, korban). Dalam merancang pertanyaan, pewawancara perlu menggunakan **pertanyaan yang efektif dan berimbang**, yaitu kombinasi antara *open-ended questions* (untuk menggali informasi mendalam) dan *close-ended questions* (untuk klarifikasi detail). Tentunya, pewawancara juga harus memiliki **keterampilan mendengar aktif (active listening)**, yaitu mendengarkan secara utuh memungkinkan pewawancara untuk memahami makna, emosi, dan pesan tersirat di balik kata-kata. Dan untuk itu, **kesabaran** adalah kunci utama. Pewawancara yang terburu-buru sering kehilangan momen penting yang justru muncul ketika lawan bicara mulai merasa aman.

Fase-Fase dalam Pre-Interview

Agar tahap *pre-interview* berjalan sistematis, maka dibagi menjadi beberapa **fase penting** yang menuntun pewawancara dari pengumpulan informasi awal hingga kesiapan psikologis sebelum bertemu dengan terperiksa. Fase-fase utama tersebut antara lain :

1. Fase Historikal (*Historical Phase*)

Fase ini menekankan pentingnya pengumpulan latar belakang kasus dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Pewawancara mempelajari kronologi kejadian, konteks sosial, dan peran tiap individu dalam peristiwa tersebut. Tujuan dari fase ini adalah memahami konteks kasus secara menyeluruh; mengenali pihak-pihak

mana saja yang terlibat dan perannya masing-masing; serta menentukan area penting yang akan digali. Pada tahap ini, pewawancara akan membaca laporan kejadian, meninjau keterangan saksi sebelumnya, serta meninjau bukti-bukti untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan objektif tentang kasus tersebut.

2. Fase Persiapan Personal (*Personal Preparation Phase*)

Pada fase ini, pewawancara mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis. Pewawancara memastikan sikapnya netral dan tidak membawa prasangka yang dapat mempengaruhi objektivitasnya dalam menangani kasus. Tujuan dari fase ini adalah pewawancara dapat mengendalikan bias pribadi dan kondisi emosinya; menanamkan sikap profesionalisme dan empati; serta membangun kesiapan mental untuk menghadapi berbagai respon dari terperiksa.

3. Fase Inisial (*Initial Phase*)

A. Pra-Kontak (*Initial or Pre-Contact Phase*)

Fase ini merupakan tahap awal interaksi antara pewawancara dan terperiksa. Tujuannya adalah menciptakan suasana aman dan membangun kepercayaan sejak awal. Pada fase ini, pewawancara perlu menyiapkan ruangan wawancara yang nyaman dan privat; serta menjelaskan tujuan wawancara dan hak-hak terperiksa. Pewawancara dapat menggunakan dua strategi pada fase pra-kontak, yaitu:

- Strategi *Floating-Point*, yaitu memulai pembicaraan dari topik yang netral dan ringan sebelum masuk ke inti kasus. Pendekatan ini membantu mengurangi ketegangan dan menyiapkan kondisi psikologis terperiksa.
- Strategi *Preliminary Inquiry*, yaitu pengumpulan informasi awal untuk mengenali pola komunikasi dan kondisi emosional subjek. Pewawancara mengamati ekspresi, gestur, nada suara, dan kesiapan terperiksa dalam menjawab pertanyaan ringan.

B. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)

Tahap ini adalah penyusunan rencana wawancara yang konkret dan terstruktur. Langkah-langkahnya adalah menentukan tujuan wawancara (apa yang ingin diketahui); menyusun urutan pertanyaan dari tipe eksploratif ke verifikatif; menyusun strategi alternatif bila terperiksa tidak kooperatif; serta mempertimbangkan waktu, setting, dan etika komunikasi. Pewawancara dapat menggunakan tiga strategi dalam fase *strategic planning*, yaitu:

- *Evaluating Potential Interviewees*
Pewawancara menilai siapa yang akan diwawancarai terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan kesiapan psikologis tiap individu. Misalnya: Dalam kasus pelecehan seksual terhadap korban yang masih anak-anak, pada proses wawancara didampingi oleh psikolog anak.
- *Creating an Interview Strategy*
Setelah semua data dan analisis terkumpul, pewawancara menyusun strategi wawancara menyeluruh yang menyesuaikan karakteristik kasus dan individu yang terlibat.
- *Preparing Psychologically for The Interview*
Pewawancara harus siap menghadapi berbagai bentuk reaksi, mulai dari penyangkalan hingga kemarahan dengan tetap memiliki kendali diri yang baik dan empati.

Proses Utama dalam *Pre-Contact Phase*

Setelah semua fase persiapan dilalui, pewawancara menjalankan empat proses teknis berikut sebagai penutup tahap *pre-interview*:

1. **Asses (Menilai)**

Pewawancara harus melakukan penilaian pada masalah yang akan diinvestigasi, yaitu: mengevaluasi kesaksian yang ada; menyimpulkan informasi dari data awal yang terkumpul; menentukan tujuan wawancara, serta menyusun langkah kerja yang terarah dan akan dilakukan.

2. **Collect (Mengumpulkan)**

Pada proses ini, pewawancara harus mengidentifikasi informasi yang masih kurang dan menentukan siapa sumber terbaik untuk memperolehnya (Saksi/korban/pihak lain yang terkait). Data harus komprehensif, mudah dipahami dan mudah digunakan dalam proses investigasi.

3. **Evaluasi (Integrasi & Analisis)**

Pada tahap integrasi, pewawancara melakukan seleksi dan memetakan detail informasi yang terkumpul antara satu informasi dengan informasi lainnya. Analisis merupakan proses menilai validitas (keakuratan) dan reliabilitas (konsisten) setiap informasi dan sumber informasi. Informasi yang diragukan perlu diverifikasi kembali dengan mencari sumber informasi yang baru dan lebih akurat.

4. **Survey (Peninjauan Awal)**

Pada tahap ini, pewawancara dapat membuat simpulan sementara berdasarkan seluruh informasi yang ia miliki sebagai dasar strategi wawancara berikutnya.

Tahap *Within Interview*

Tahap *Within-Interview* adalah **tahapan inti** dari seluruh proses wawancara. Pada tahap ini, pewawancara berinteraksi langsung dengan terperiksa untuk menggali kebenaran dari kasus yang terjadi. Tujuannya bukan sekadar memperoleh informasi, melainkan juga membangun komunikasi dua arah yang jujur, etis, dan berimbang. Terdapat 3 tahap utama dalam *within interview*, yaitu:

1. Kontak

Tahap pertama dari *within-interview* adalah kontak awal, yaitu pertemuan langsung antara pewawancara dan terperiksa. Bagian ini terlihat sederhana, namun sesungguhnya sangat menentukan arah seluruh proses wawancara. Kontak awal membentuk landasan psikologis bagi hubungan yang aman dan konstruktif. Pewawancara

perlu memulai dengan sikap terbuka, tenang, dan menghargai, tanpa menunjukkan tekanan, kecurigaan, atau rasa superior. Suasana awal yang baik akan menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepercayaan terperiiksa. Langkah penting dalam tahap kontak adalah:

- Perkenalkan diri dengan jelas dan profesional
- Jelaskan konteks wawancara secara singkat dan transparan, agar terperiiksa memahami perannya.
- Gunakan bahasa tubuh terbuka dengan kontak mata yang wajar dan postur tubuh yang tidak mengancam.
- Pastikan lingkungan kondusif dengan privasi yang terjaga dan gangguan yang minimal.

2. Kesan Pertama

Kesan pertama memiliki kekuatan besar. Dalam wawancara psikologis maupun forensik, beberapa menit pertama akan menentukan apakah terperiiksa akan terbuka atau justru menutup diri. Kesan pertama terbentuk dari dua hal utama yaitu sikap pewawancara (apakah hangat, empati, dan sebagainya) dan situasi saat wawancara (apakah terasa aman, privat, dan lain-lain). Oleh karena itu, pewawancara perlu menggunakan kata-kata yang netral dan tidak menghakimi serta menunjukkan empati. Pewawancara juga perlu peka terhadap reaksi awal dari terperiiksa. Jika subjek terlihat tegang, gugup, atau defensif, pewawancara dapat menunda pertanyaan substantif dan memperpanjang tahap *rapport-building* dengan topik netral, seperti kegiatan sehari-hari, lingkungan kerja, atau pengalaman umum.

3. Proses Evaluasi terhadap *Interviewee*

Setelah kontak dan kesan pertama terbangun, pewawancara mulai memasuki proses evaluasi terhadap interviewee, yaitu tahap pengamatan dan penilaian selama wawancara berlangsung. Tahap ini dilakukan melalui pengamatan mendalam dan berkelanjutan terhadap perilaku verbal dan nonverbal terperiiksa.

GEMAC

Menurut Shepherd (dalam Milne & Bull, 2000), wawancara efektif terdiri dari empat langkah utama (GEMAC) yang dilakukan pada fase *within*

interview, yaitu :

1. *Greeting* (Perkenalan)

Langkah pertama adalah memperkenalkan diri secara profesional dan membangun rasa aman. Tujuan dari langkah pertama ini adalah menciptakan kesan pertama yang positif serta menegaskan bahwa pewawancara menghormati hak dan martabat terperiksa.

Contoh:

“Rencana saya untuk wawancara ini adalah menjelaskan hak-hak Anda terlebih dahulu. Jika Anda bersedia memberikan pernyataan, saya akan mendengarkan sepenuhnya. Setelah selesai, saya akan menindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan tambahan. Anda bebas bertanya kapan saja.”

2. *Explanation* (Penjelasan & Eksplorasi Awal)

Pewawancara memberi kesempatan kepada terperiksa untuk menceritakan peristiwa secara bebas dan lengkap. Tujuan dari langkah kedua ini adalah mendapatkan gambaran awal peristiwa dari sudut pandang terperiksa serta menggali informasi. Panduan dalam berkomunikasi adalah Jelaskan (**Explain**), Gambarkan (**Describe**), Tunjukkan (**Show me**) – Secara Tepat (**Precisely**), Rinci (**In detail**), dan Akurat (**Exactly**)

Contoh:

“Sekarang saya ingin mendengar dari Anda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakan secara tepat, rinci, dan akurat. Penting untuk mencakup semua rincian. Jangan meninggalkan apapun. Yang menurut anda tidak penting, bisa saja penting untuk investigasi. Gunakan waktu anda. Saya tidak akan menyela. Jika sudah siap, tolong gambarkan secara tepat dan rinci apa yang terjadi tadi malam. Ceritakan pada saya semuanya.”

3. *Mutual Activity* (Kegiatan Timbal Balik)

Fase interaktif di mana pewawancara memonitor, mempertanyakan, dan mengklarifikasi informasi yang muncul. Tahap ini membutuhkan keterampilan bertanya karena *interviewer* harus menyerap informasi; membuat rangkuman; memberi pertanyaan lanjutan; menilai

konsistensi jawaban dari terperiksa; serta memilah informasi yang penting dan tidak benar sehingga kesimpulan menjadi akurat. Langkahnya adalah sebagai berikut: memberikan pertanyaan awal untuk menceritakan kejadian yang dialami lalu memberi pertanyaan lanjutan (*probing*) untuk menggali informasi, kemudian menyimpulkan dan menghubungkan antara satu area topik dengan area lain yang saling berkaitan/relevan.

Contoh :

“Anda tadi menyebut pria berbaju putih menyerang dengan pisau. Bisa dijelaskan lebih rinci bagaimana dia mendekati Anda?”

Pada fase ini, keterampilan pewawancara menjadi kunci utama karena pewawancara dapat menentukan **kapan harus menyela** dengan sopan. Terlalu sering memotong atau menginterupsi dapat mengganggu alur berpikir *interviewee* dan mengurangi data nonverbal yang berharga. Informasi non-verbal dapat dilihat dari satu wawancara dan dibandingkan dari beberapa wawancara.

Interviewee atau terperiksa bisa menunjukkan resistensi dalam wawancara, misalnya diam, tidak berkomentar, tidak mau bekerja sama, menolak, mengatakan tidak mengetahui, berbohong, dan agresif. Menurut Shepherd (dalam Milne & Bull, 2000), resistensi sering muncul karena perilaku pewawancara sendiri baik perilaku verbal maupun nonverbal. Resistensi dipengaruhi oleh dua dimensi, yaitu motivasi untuk berbicara dan kemampuan untuk memberi informasi.

	MAMPU	TIDAK MAMPU	
MOTIVASI	Terbuka, Kooperatif	<u>Bingung, tidak mampu mengingat atau menstrukturkan cerita</u>	MAU
	<u>Defensif, Menyimpan Informasi</u>	<u>Tidak terlibat atau tidak memiliki informasi</u>	TIDAK MAU
	KEMAMPUAN		

Gambar 12. Model Resistensi

Tugas pewawancara adalah mengidentifikasi jenis resistensi dan menyesuaikan pendekatan yang digunakan. Misalnya: pendekatan empatik untuk yang enggan; sabar untuk yang tidak mampu; dan investigatif untuk yang menolak.

4. Close (Penutup)

Tahap akhir wawancara berfungsi menutup interaksi dengan kesan positif dan memberikan kejelasan tindak lanjut. Langkah penting yang harus dilakukan pada tahap ini adalah menyampaikan ringkasan wawancara, menjelaskan tahapan selanjutnya (misalnya: pemanggilan lanjutan); memberi kesempatan interviewee bertanya atau menambahkan informasi; serta mengucapkan terima kasih dengan sopan. Penutup yang baik memperkuat persepsi keadilan dan profesionalisme pewawancara.

Contoh :

“Terima kasih atas waktu dan keterbukaan Anda. Setelah ini kami akan mempelajari hasil wawancara ini. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, kami akan menghubungi Anda kembali. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin Anda tanyakan?”

Keterampilan Interviewer

Terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pemeriksa

dalam melakukan wawancara, antara lain:

1. Keterampilan *Micro skills*

Terdapat enam keterampilan mikro/dasar yang harus dimiliki oleh pewawancara saat menerapkan langkah GEMAC, yaitu :

- a. Observasi dan Mengingat: memperhatikan perubahan verbal dan nonverbal.
- b. Mendengarkan dan Memberi Pernyataan: memberi umpan balik aktif dan reflektif.
- c. Mengontrol Jalannya Wawancara: menjaga alur tanpa kehilangan fleksibilitas.
- d. Menggunakan Cara Bertanya yang Tepat: menyesuaikan jenis dan nada pertanyaan.
- e. Mendengarkan Aktif dan Memproses Informasi: mengolah makna dari respons lawan bicara.
- f. Mengonfrontasikan Perasaan dan Menyimpulkan: mengidentifikasi ketidakkonsistenan dengan empati dan menyimpulkan secara objektif.



Gambar 13. Ilustrasi Observasi

Sumber:

<https://www.sonora.id/read/423901315/observasi-pengertian-ciri-ciri-dan-jenisnya>

2. Keterampilan *Macro skills*

Semakin baik penguasaannya pada enam *micro skills* tersebut maka semakin baik kemampuannya dalam melakukan empat *macro skills*.

Keempat *macro skills* tersebut, yaitu :

- a. Mendeteksi perubahan nonverbal selama wawancara.
- b. Mengetahui perubahan emosi, sikap, dan motivasi terperiksa.
- c. Memberikan gambaran umum tentang jalannya wawancara.

- d. Mengidentifikasi ketidakkonsistenan dan ketidakjelasan hal-hal yang dimiliki dan disampaikan oleh terperiksa.

Tahap *Post-Interview*

Tahap *post-interview* merupakan tahap evaluasi dan refleksi setelah proses wawancara selesai dilakukan. Tahap ini merupakan proses penutup yang memastikan hasil wawancara terolah dengan akurat, sistematis, dan etis. Pada tahap ini, pewawancara tidak lagi berinteraksi langsung dengan terperiksa, tetapi bekerja untuk menyusun, menafsirkan, dan mengintegrasikan seluruh hasil wawancara ke dalam pemahaman yang komprehensif tentang kasus yang ditangani. Tujuan utama dari *post-interview* adalah sebagai berikut :

1. Menyusun simpulan lengkap tentang seluruh kasus.
Pewawancara harus menggabungkan seluruh informasi verbal dan nonverbal yang diperoleh untuk membentuk gambaran utuh tentang kejadian, pelaku, korban, dan konteks situasional.
2. Menentukan kelengkapan data
Apabila ditemukan informasi yang masih kurang, tidak konsisten, atau belum terverifikasi, pewawancara perlu merencanakan wawancara lanjutan dengan fokus khusus untuk melengkapi kekosongan tersebut.
3. Melakukan refleksi profesional.
Pewawancara menilai kembali bagaimana proses wawancara berlangsung, apakah sudah sesuai etika, apakah *rapport* berhasil terbangun, serta bagaimana respons emosional pewawancara dan terperiksa selama wawancara.
4. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.
Semua catatan, rekaman, atau dokumen hasil wawancara harus disimpan dengan aman dan hanya diakses oleh pihak yang berwenang.

3.12 Rangkuman

Investigasi adalah proses pengumpulan informasi dan bukti secara logis dan sistematis untuk menemukan kebenaran dan memecahkan suatu masalah. Di dalam proses ini terdapat berbagai langkah, salah satunya adalah interogasi. Interogasi sendiri merupakan proses tanya jawab yang biasanya dilakukan kepada orang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama tersangka, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan atau pengakuan. Jadi, investigasi bersifat lebih luas dan dapat menggunakan berbagai sumber informasi (saksi, dokumen, barang bukti, forensik), sedangkan interogasi berfokus pada penggalian informasi dari individu melalui tanya jawab.

Wawancara dan interogasi sama-sama menggunakan bentuk percakapan tanya jawab, tetapi berbeda dalam suasana, tujuan, dan pendekatannya. Wawancara bersifat kooperatif, berupaya membangun hubungan kerja sama antara pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi secara sukarela. Suasananya lebih netral, formal namun tidak mengancam, dan pertanyaannya cenderung terbuka serta eksploratif. Sebaliknya, interogasi cenderung konfrontatif, berorientasi pada pembuktian dan pengakuan, dan sering menggunakan pertanyaan yang terarah dan menekan untuk menguji konsistensi jawaban.

Dalam sejarah kepolisian Indonesia, teknik investigasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada era kolonial, kekerasan fisik terbuka seperti pukulan, cambukan, dan kurungan digunakan bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi juga untuk menakut-nakuti rakyat dan menjaga kekuasaan. Pada awal kemerdekaan hingga Orde Baru, pola ini masih banyak terbawa, termasuk penggunaan kekerasan langsung maupun terselubung dalam interogasi. Memasuki era reformasi, pengakuan yang diperoleh melalui tekanan dan penyiksaan dinyatakan tidak sah, prinsip HAM mulai ditegakkan, dan teknik wawancara non-koersif mulai diperkenalkan. Di era modern, penegakan hukum diarahkan untuk lebih profesional dan humanis dengan menggunakan alat forensik, rekaman audio-video, serta melibatkan psikolog forensik.

Wawancara investigasi idealnya dilakukan secara profesional dan beretika. Tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran, bukan sekadar memaksa pengakuan. Karena itu, kekerasan fisik maupun psikologis tidak dibenarkan. Investigator perlu mengandalkan wawancara, observasi, serta pengumpulan bukti lain, sambil tetap menjaga martabat dan hak orang yang diperiksa. Dalam praktik, pewawancara sering menghadapi tantangan berupa kebohongan, penghindaran, sikap defensif, serta berbagai bentuk mekanisme pertahanan diri dari saksi atau tersangka, seperti penyangkalan, rasionalisasi, menarik diri, atau bahkan ledakan emosi.

Untuk meningkatkan kualitas informasi yang diberikan saksi, dikembangkan wawancara kognitif. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kesaksian sangat dipengaruhi oleh perhatian, persepsi, dan memori. Ingatan seseorang bersifat selektif dan konstruktif: tidak semua informasi yang dilihat akan disimpan, dan apa yang diingat dapat bercampur dengan pengetahuan, harapan, emosi, maupun pengalaman sebelumnya. Dalam wawancara kognitif, saksi dibantu untuk mengingat kembali peristiwa dengan cara membangun kembali konteks kejadian, menceritakan secara bebas, kemudian dipandu melalui pertanyaan lanjutan dan pengulangan cerita dari sudut dan urutan yang berbeda. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas detail tanpa menekan atau mengarahkan secara manipulatif.

Pemeriksa juga perlu memahami dinamika psikologis orang yang diperiksa. Tersangka maupun saksi dapat menunjukkan reaksi frustrasi berupa agresi, menarik diri, atau kecemasan. Mereka dapat menggunakan mekanisme pertahanan diri, mulai dari yang relatif “ringan” seperti penyangkalan dan rasionalisasi, hingga yang lebih berat seperti distorsi dan proyeksi delusional. Di balik perilaku itu, sering ada kebutuhan psikologis mendasar, seperti kebutuhan akan rasa aman dan kontrol, kebutuhan untuk diakui dan menjadi bagian dari kelompok, atau kebutuhan akan kedekatan dan kasih sayang. Memahami kebutuhan dan mekanisme ini membantu pewawancara memilih pendekatan yang lebih empatik tanpa kehilangan ketegasan.

Agar wawancara berjalan efektif, pewawancara perlu menguasai berbagai keterampilan. Keterampilan dasar (*micro skills*) meliputi kemampuan mengamati dan mengingat, mendengarkan aktif, mengarahkan jalannya wawancara, menggunakan jenis pertanyaan yang tepat, memproses informasi, dan mengkonfrontasi ketidakkonsistenan dengan cara yang tetap menghargai. Ketika *micro skills* ini dikuasai, pewawancara akan lebih mampu menjalankan keterampilan yang lebih besar (*macro skills*), seperti mendeteksi perubahan nonverbal, memahami perubahan emosi dan motivasi, menggambarkan jalannya wawancara secara utuh, dan mengidentifikasi bagian-bagian informasi yang masih kabur atau tidak konsisten.

Dalam kerangka *Conversation Management (CM)*, proses wawancara dibagi ke dalam tiga tahap besar: *pre-interview*, *within-interview*, dan *post-interview*. Pada tahap *pre-interview*, pewawancara mempersiapkan diri dengan mempelajari kasus, mengenali bias pribadi, merencanakan strategi, serta membangun kesiapan psikologis. Pada tahap *within-interview*, pewawancara membangun kontak dan kesan pertama yang aman, menjelaskan tujuan, memberi kesempatan terperiksa bercerita, lalu melakukan penggalan dan klarifikasi secara sistematis. Salah satu model yang digunakan adalah *GEMAC*: *Greeting* (menyapa dan membangun *rapport*), *Explanation* (menjelaskan dan memberi ruang narasi), *Mutual Activity* (tanya jawab timbal balik dan klarifikasi), dan *Closing* (penutupan yang jelas dan tetap menghargai). Terakhir, pada tahap *post-interview*, seluruh informasi disusun, dinilai kelengkapannya, dianalisis secara kritis, dan didokumentasikan dengan menjaga kerahasiaan.

Secara keseluruhan, teks tersebut menekankan bahwa investigasi dan wawancara dalam konteks penegakan hukum tidak hanya soal teknik bertanya, tetapi juga soal etika, pemahaman psikologi manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi. Pendekatan yang humanis, terstruktur, dan berbasis ilmu pengetahuan diharapkan dapat menghasilkan proses pencarian kebenaran yang lebih adil, akurat, dan bertanggung jawab.

3.13 Bahan Diskusi

1. Apa perbedaan utama antara investigasi, interogasi, dan wawancara dalam konteks penegakan hukum, dan mengapa penting untuk memahaminya secara jelas ?
2. Apa risiko psikologis dan hukum yang dapat muncul bila interogasi masih dilakukan dengan pendekatan koersif atau penuh tekanan ?
3. Bagaimana mekanisme pertahanan diri (seperti penyangkalan, rasionalisasi, atau proyeksi) dapat memengaruhi hasil wawancara terhadap saksi atau tersangka ?
4. Apa peran *micro skills* dan *macro skills* dalam memastikan wawancara investigatif berjalan efektif dan etis ?
5. Bagaimana penerapan model *GEMAC* (*Greeting, Explanation, Mutual Activity, Closing*) dapat membantu pewawancara menjaga struktur dan hubungan yang sehat dengan terperiiksa ?

3.14 Feedback

1. Mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi bahwa investigasi merupakan proses yang paling luas, yang mencakup pengumpulan, analisis, dan verifikasi informasi untuk mengungkap suatu peristiwa atau tindak kriminal. Wawancara dipahami sebagai teknik penggalian informasi dari saksi, korban, atau pihak terkait dengan pendekatan yang lebih terbuka dan eksploratif. Interogasi biasanya dilakukan kepada tersangka dengan tujuan mengklarifikasi keterlibatan atau memperoleh pengakuan terkait suatu peristiwa. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ketiganya penting agar proses penegakan hukum berjalan profesional, etis, serta menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Pendekatan interogasi yang penuh tekanan dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan ketakutan pada individu yang diperiksa. Tekanan psikologis dapat meningkatkan kemungkinan munculnya false confession (pengakuan palsu) atau informasi yang tidak akurat. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak asasi individu serta

merusak integritas proses penegakan hukum. Dari sisi hukum, penggunaan metode koersif dapat menyebabkan hasil pemeriksaan dianggap tidak valid atau tidak dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

3. Mekanisme pertahanan diri seperti penyangkalan (*denial*) dapat membuat individu menolak atau menghindari pengakuan terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Rasionalisasi dapat membuat individu memberikan penjelasan yang tampak logis untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya bermasalah. Proyeksi dapat membuat individu menyalahkan pihak lain atas tindakan atau perasaan yang sebenarnya berasal dari dirinya sendiri. Pewawancara perlu memiliki sensitivitas psikologis agar dapat mengenali kemungkinan distorsi informasi akibat mekanisme pertahanan diri tersebut.
4. *Micro skills* meliputi keterampilan komunikasi dasar seperti mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan terbuka, menunjukkan empati, serta menjaga bahasa tubuh yang mendukung. *Macro skills* berkaitan dengan kemampuan mengelola keseluruhan proses wawancara, seperti perencanaan, penyusunan alur pertanyaan, dan evaluasi informasi yang diperoleh. Kombinasi kedua keterampilan ini penting untuk memastikan wawancara berjalan efektif, sistematis, dan tetap menjunjung tinggi etika profesional.
5. *Greeting* membantu membangun suasana awal yang lebih nyaman dan profesional antara pewawancara dan individu yang diperiksa. *Explanation* memberikan penjelasan mengenai tujuan dan proses wawancara sehingga menciptakan transparansi. *Mutual Activity* memungkinkan proses pertukaran informasi berlangsung secara kooperatif dan terarah. *Closing* membantu menutup wawancara dengan jelas, merangkum informasi yang diperoleh, serta menjaga hubungan profesional. Model **GEMAC** membantu pewawancara menjaga struktur wawancara yang sistematis sekaligus hubungan interpersonal yang sehat dengan terperiksa.

3.15 Refleksi

- Diskusi menunjukkan bahwa membedakan investigasi, wawancara, dan interogasi bukan hanya persoalan istilah, tetapi berkaitan langsung dengan cara memperoleh informasi secara profesional, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Mahasiswa mulai memahami bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga melibatkan dinamika psikologis individu. Pendekatan yang tidak tepat dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berdampak pada kualitas informasi yang diperoleh.
- Diskusi memperlihatkan bahwa penggunaan metode yang koersif tidak hanya berisiko secara hukum, tetapi juga dapat merusak integritas proses investigasi. Oleh karena itu, pendekatan yang menghormati martabat individu dan prinsip keadilan menjadi sangat penting.
- Mekanisme pertahanan diri seperti penyangkalan, rasionalisasi, dan proyeksi menunjukkan bahwa informasi yang diberikan seseorang tidak selalu sepenuhnya objektif. Hal ini menuntut pewawancara untuk memiliki kepekaan psikologis dan kemampuan analisis yang baik.
- Diskusi menegaskan bahwa keterampilan komunikasi, baik pada level micro skills maupun macro skills, merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh praktisi di bidang penegakan hukum maupun psikologi forensik.
- Model GEMAC membantu pewawancara menjaga alur wawancara yang jelas, membangun hubungan yang profesional, serta memastikan proses penggalian informasi berlangsung secara efektif dan etis.
- Refleksi dari diskusi ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu mengembangkan tidak hanya pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan komunikasi, sensitivitas psikologis, serta pemahaman

etika yang kuat agar mampu menjalankan proses wawancara investigatif secara profesional di dunia kerja.

3.16 Asesmen: Roleplay Wawancara Investigasi

Luaran

Praktik simulasi/*roleplay* secara berkelompok untuk melakukan wawancara investigasi dan menyusun laporannya.

Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk menganalisis metode investigasi dalam memeriksa bukti, saksi, korban, dan pelaku dalam sebuah kasus hukum melalui simulasi/*roleplay*.

Petunjuk Tugas

1. Mendeskripsikan tahap wawancara serta membuat daftar/panduan pertanyaan wawancara.
 - Deskripsikan tahap wawancara yang dilakukan baik pada saksi maupun tersangka.
 - Deskripsikan daftar pertanyaan yang dilakukan baik pada saksi maupun tersangka.
2. Melakukan simulasi/*roleplay* terhadap saksi
 - Saksi bisa lebih dari satu, namun dijelaskan perannya sebagai apa dan dituliskan hasilnya secara terpisah.
 - Deskripsikan hasil wawancara terhadap saksi dengan detail, jelas, dan komprehensif.
3. Melakukan simulasi/*roleplay* terhadap tersangka
 - Deskripsikan hasil wawancara terhadap tersangka dengan detail, jelas, dan komprehensif.
4. Melakukan simulasi/*roleplay* terhadap korban (bila korban masih ada)
 - Deskripsikan hasil wawancara terhadap korban dengan detail, jelas, dan komprehensif

5. Membuat refleksi dari hasil simulasi/*roleplay* wawancara investigasi yang sudah dilakukan terhadap saksi, pelaku, dan/atau korban.

- Tuliskan refleksi Anda terhadap proses wawancara investigasi yang anda lakukan bersama kelompok.
- Refleksi dilakukan secara individual.

Lampiran Tugas

- Link video wawancara investigasi terhadap saksi dan/atau korban (durasi 5-10 menit). Kalau saksi lebih dari satu wawancara boleh maksimal 20 menit.
- Link video wawancara investigasi terhadap tersangka (durasi 5-10 menit)

Referensi

Fisher, R. P., & Geiselman, R. E. (1992). *Memory-enhancing techniques for investigative interviewing: The Cognitive Interview*. Charles C. Thomas.

Milne, R., & Bull, R. (1999). *Investigative interviewing: Psychology and practice*. Wiley.

Shepherd, E. (1993). *Effective interviewing: Theory, techniques and practice*. McGraw-Hill.

Vrij, A. (2008). *Detecting lies and deceit: Pitfalls and opportunities* (2nd ed.). Wiley.

Kassin, S. M., Drizin, S. A., Grisso, T., Gudjonsson, G. H., Leo, R. A., & Redlich, A. D. (2010). Police-induced confessions: Risk factors and recommendations. *Law and Human Behavior*, 34(1), 3–38.

<https://doi.org/10.1007/s10979-009-9188-6>.

3.17 Rubrik

Kriteria	Bobot	45-54.99	55-69.99	Mastery 70-84.99	85-100
Akurasi analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Relevansi kasus dengan teori • Kesesuaian teori yang digunakan • Luasnya teori yang diterapkan • Referensi diformat sesuai dengan pedoman penulisan APA 	30%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2-3 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kedalaman analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborasi analisis kasus dengan teori • Kekuatan argumen • Kejelasan argumen dengan kasus yang dibahas 	30%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kontribusi individu dalam kelompok	20%	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.
Kemampuan Presentasi	20%	Ragu-ragu; tidak jelas tentang apa yang disampaikan.	Cukup jelas, tetapi hanya membaca informasi yang tertulis di PPT.	Mampu menjelaskan dengan memadai.	Fleksibel dan sangat jelas dalam penyampaiannya; PPT-nya menarik.

BAB IV

Criminal Profiling

Sub Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis profiling kriminal (*criminal profiling*) dari kasus hukum.

Deskripsi Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan tujuan criminal profiling serta peran profiler dalam membantu penyidikan berbasis bukti TKP.
2. Mahasiswa mampu menganalisis perilaku pelaku melalui TKP dengan membedakan dan menginterpretasi modus operandi (MO), signature, serta konsep dasar victimology.
3. Mahasiswa mampu menerapkan tahapan criminal profiling (input, decision process models, crime assessment, criminal profile, investigasi, apprehension) secara sistematis dalam studi kasus.
4. Mahasiswa mampu menilai dan mengklasifikasikan pola kejahatan (mis. organized vs disorganized; planned vs impulsive) serta mengidentifikasi motif berdasarkan indikator perilaku dan bukti.
5. Mahasiswa mampu menyusun profil kriminal probabilistik (demografis, psikologis, perilaku) dan mengaitkannya dengan strategi investigasi/interogasi serta verifikasi di lapangan secara etis.

Relevansi dengan Dunia Kerja

1. Membekali lulusan dengan kompetensi analisis perilaku kriminal berbasis bukti, yang dibutuhkan dalam profesi psikolog forensik, penyidik, dan analis kriminal.
2. Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan investigatif yang akurat dan sistematis, penting bagi kepolisian, lembaga hukum, dan unit intelijen.

3. Mengembangkan keterampilan risk assessment dan pencegahan kejahatan, relevan untuk sektor keamanan, lembaga pemasyarakatan, dan lembaga perlindungan publik.
4. Menyiapkan lulusan untuk bekerja dalam kolaborasi multidisipliner (psikologi, hukum, forensik), yang menjadi tuntutan utama dunia kerja modern.
5. Membentuk profesional yang menjunjung etika, akuntabilitas, dan HAM, sebagai standar kerja di institusi penegakan hukum dan organisasi publik.

4.1 Definisi *Criminal Profiling*

Dalam dunia psikologi forensik, memahami kejahatan tidak hanya berhenti pada apa yang tampak di permukaan, tetapi juga pada siapa pelakunya dan mengapa ia melakukannya. Di sinilah peran seorang criminal profiler menjadi penting. Seorang profiler berupaya menyimpulkan kepribadian, motif, serta karakteristik tersangka berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Melalui pengamatan terhadap detail kecil, analisis perilaku, dan interpretasi pola tindakan, profiler membantu penegak hukum mempersempit lingkaran tersangka dan memahami dinamika psikologis di balik tindak criminal.

Salah satu aspek utama yang menjadi fokus dalam analisis perilaku pelaku kejahatan adalah modus operandi atau metode operasi. Modus operandi mencakup pola perilaku khas yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan kejahatannya, mulai dari alat yang digunakan, cara-cara yang diterapkan, hingga urutan tindakan yang dilakukan. Setiap pelaku umumnya memiliki pola tertentu yang, meskipun dapat berubah atau berkembang seiring waktu, mencerminkan kebiasaannya dalam melakukan kejahatan.

Namun, di luar modus operandi, beberapa pelaku meninggalkan sesuatu yang lebih pribadi di TKP—yang disebut sebagai signature. Berbeda dari modus operandi yang bersifat fungsional, signature merupakan jejak emosional atau simbolik yang mencerminkan kebutuhan psikologis pelaku. Tanda ini bisa berupa tindakan spesifik, benda yang sengaja ditinggalkan, atau pola yang berulang tanpa alasan praktis. Analisis

terhadap signature sering kali membuka wawasan lebih dalam tentang motif tersembunyi dan kondisi mental pelaku.

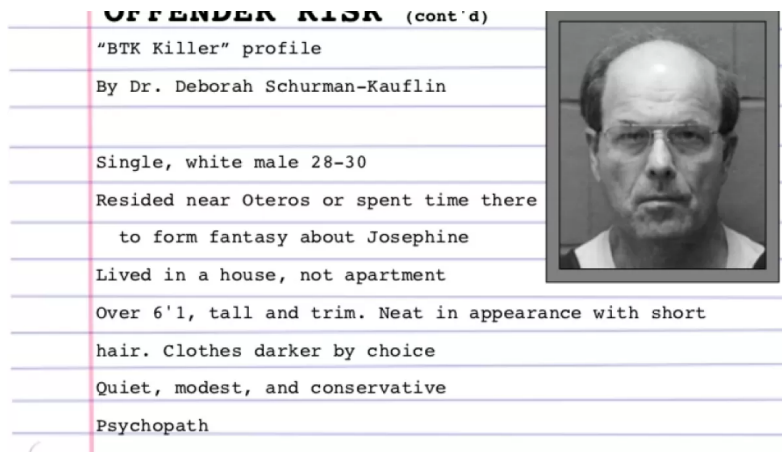
Selain menganalisis pelaku, criminal profiling juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman tentang korban. Victim atau korban merupakan bagian integral dari setiap tindak kejahatan. Melalui studi victimology, para ahli berusaha memahami siapa korban, mengapa ia menjadi target, serta bagaimana hubungan antara pelaku dan korban dapat terbentuk. Pendekatan ini membantu profiler melihat dinamika interaksi pelaku–korban sebagai cerminan dari kebutuhan psikologis, pola kontrol, atau dorongan emosional tertentu.

Dengan memahami peran profiler, pentingnya modus operandi dan signature, serta signifikansi victimology, kita dapat melihat bahwa setiap tindakan kriminal bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga ekspresi kompleks dari pikiran dan kepribadian manusia. Bab ini akan membahas lebih dalam mengenai konsep-konsep tersebut, proses analisis yang digunakan, serta bagaimana pemahaman psikologi dapat membantu mengungkap misteri di balik kejahatan.

Apa itu Criminal Profiling?

Criminal profiling merupakan proses ilmiah dan sistematis untuk mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian, kecenderungan perilaku, pola pikir, serta karakteristik sosial-demografis dari seorang pelaku kejahatan berdasarkan bukti dan informasi yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Melalui analisis mendalam terhadap pola tindakan, pemilihan korban, lokasi kejadian, serta cara pelaku mengeksekusi kejahatannya, seorang profiler berupaya membangun gambaran psikologis yang dapat membantu penyidik mempersempit lingkaran tersangka. Criminal profiling tidak hanya berfungsi untuk memahami siapa pelaku suatu kejahatan, tetapi juga merupakan bentuk prediction, yaitu usaha untuk memperkirakan siapa yang mungkin menjadi pelaku berikutnya, di mana, dan bagaimana kejahatan serupa dapat terjadi di masa depan. Dengan demikian, profiling menjadi jembatan antara psikologi dan penegakan hukum, yang memungkinkan penyidik melihat

kejahatan bukan semata sebagai tindakan kriminal, tetapi juga sebagai cerminan kompleksitas kepribadian manusia dan dinamika perilaku yang melatarbelakanginya.



Gambar 14. Ilustrasi Criminal Profiling

Sumber : <https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201712/criminal-profiling-the-original-mind-hunter>

Criminal Profiling Masa Kini

Tokoh penting yang memperkenalkan konsep profiling modern adalah Dr. James A. Brussel, seorang psikiater forensik asal Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor yang melihat criminal profiling sebagai alat diagnostik yang menjembatani kesenjangan antara penyelidikan kriminal dan ilmu psikiatri. Dalam kasus "Mad Bomber of New York", Brussel membuat profil pelaku berdasarkan pola serangan, pemilihan lokasi, dan sifat surat-surat yang dikirim pelaku. Profil yang dibuatnya termasuk deskripsi rinci tentang kepribadian dan bahkan pakaian yang dikenakan saat penangkapan, terbukti sangat akurat, dan menjadi tonggak awal perkembangan profiling ilmiah di dunia modern.

Kontribusi Brussel membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara penegak hukum dan tenaga profesional di bidang kesehatan mental.

Sejak saat itu, *criminal profiling* tidak lagi dipandang sebagai seni intuisi semata, melainkan sebagai proses ilmiah yang berbasis pada observasi, data empiris, serta pemahaman psikodinamis manusia. Pendekatan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh lembaga seperti FBI melalui Behavioral Science Unit (BSU), yang berfokus pada pengumpulan data perilaku pelaku dan pembentukan basis data kejahatan berbasis pola (*crime pattern analysis*).

Dengan demikian, modern day profiling merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan spekulatif menuju pendekatan multidisipliner yang memadukan ilmu forensik, psikologi, psikiatri, dan penegakan hukum. Melalui sinergi tersebut, proses identifikasi dan prediksi pelaku kejahatan menjadi lebih sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4.2 Tahapan dalam Criminal Profiling

Proses *criminal profiling* pada dasarnya merupakan pendekatan sistematis untuk memahami cara berpikir pelaku dan bagaimana pola pikir tersebut tercermin dalam perilakunya di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Logika dasarnya adalah: cara seseorang berpikir akan memandu cara ia bertindak. Oleh karena itu, dengan menganalisis perilaku yang tampak, seperti pola serangan, pilihan korban, atau cara pelaku menutupi jejak. Seorang *profiler* dapat menelusuri kembali bagaimana pola pikir, motivasi, dan karakteristik kepribadian pelaku terbentuk.

Untuk mencapai pemahaman tersebut, *criminal profiling* biasanya mengikuti enam tahap utama, yaitu input, decision process models, crime assessment, criminal profile, investigation, dan apprehension.

Tahap 1 Input

Tahap pertama dalam *criminal profiling* adalah Input, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dari kehidupan korban. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan profil karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan ketepatan analisis pada langkah-

langkah berikutnya. Seorang profiler harus berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di TKP, bukan hanya dari bukti fisik, tetapi juga dari konteks sosial dan psikologis yang melingkupinya. Prinsip dasarnya adalah cara berpikir seseorang akan memandu perilakunya, sehingga dengan mempelajari perilaku pelaku di TKP, profiler dapat menelusuri pola pikir yang melatarbelakanginya.



Gambar 15. Ilustrasi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Sumber:

<https://www.harianpilar.com/2016/05/25/9-polsek-ikuti-lomba-olah-tpk/>

Tahap pertama dalam criminal profiling adalah Input, yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dari kehidupan korban. Tahap ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan profil karena kualitas data yang dikumpulkan akan menentukan ketepatan analisis pada langkah-langkah berikutnya. Seorang profiler harus berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi di TKP, bukan hanya dari bukti fisik, tetapi juga dari konteks sosial dan psikologis yang melingkupinya. Prinsip dasarnya adalah cara berpikir seseorang akan memandu perilakunya, sehingga dengan mempelajari perilaku pelaku di TKP, profiler dapat menelusuri pola pikir yang melatarbelakanginya.

Data yang dikumpulkan meliputi berbagai aspek. Pertama, penempatan korban dan senjata (placement of the victim and weapon(s)) sangat penting untuk merekonstruksi urutan kejadian. Posisi tubuh korban, jarak dengan senjata, serta arah benda-benda di sekitar lokasi dapat mengungkap apakah korban diserang secara tiba-tiba, berusaha melawan, atau bahkan dipindahkan setelah kematian. Misalnya, jika korban ditemukan dengan senjata di tangan kanan tetapi darah menetes ke arah kiri, hal ini dapat menunjukkan adanya manipulasi pasca kejadian.

Begitu juga dengan posisi tubuh korban (*body position*), yang mencerminkan kondisi fisik maupun emosional pada saat serangan. Tubuh dalam posisi melindungi diri menunjukkan perjuangan atau ketakutan, sedangkan posisi yang tenang bisa mengindikasikan korban tewas dalam keadaan tidak sadar atau terkejut.

Selanjutnya, pola percikan darah (*blood splatter*) menjadi salah satu bukti forensik paling informatif. Bentuk dan arah percikan darah dapat menggambarkan dinamika gerakan antara pelaku dan korban, jenis serangan yang dilakukan, hingga jarak antar keduanya. Misalnya, percikan darah berbentuk garis panjang di dinding menandakan senjata diayunkan berulang kali, sedangkan percikan kecil menyebar halus (*mist pattern*) menunjukkan adanya luka tembak jarak dekat. Profiler kemudian menghubungkan bukti ini dengan kondisi lingkungan sekitar (*condition of surroundings*). Lingkungan yang berantakan, pintu yang rusak, atau barang yang hilang dapat menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan secara impulsif atau disertai motif pencurian. Sebaliknya, jika TKP tampak rapi tanpa tanda masuk paksa, kemungkinan besar pelaku dikenal oleh korban atau memiliki akses ke lokasi tersebut.

Selain bukti fisik, riwayat hidup korban (*history of the victim*) juga dikumpulkan untuk memahami konteks sosial dan psikologis yang mungkin berkaitan dengan kejahatan. Informasi seperti hubungan interpersonal, konflik pribadi, masalah keuangan, atau ancaman yang diterima sebelumnya dapat membantu profiler mengidentifikasi motif pelaku. Pekerjaan dan reputasi korban (*employment and reputation*) turut memberikan petunjuk, karena lingkungan kerja sering kali menjadi sumber konflik atau ancaman. Misalnya, seorang jurnalis investigatif yang baru menulis artikel sensitif mungkin menjadi sasaran pembalasan.

Tidak kalah penting adalah kebiasaan sosial (*social habits*) serta hobi dan minat korban (*hobbies and interests*). Rutinitas harian, pertemanan, dan aktivitas yang sering dilakukan membantu profiler memahami kapan dan di mana korban paling rentan. Contohnya, seseorang yang setiap malam berjalan pulang sendirian di rute yang sama membuka peluang bagi pelaku untuk merencanakan serangan. Hobi tertentu, seperti

berpartisipasi dalam komunitas daring atau kegiatan malam, juga dapat mempertemukan korban dengan calon pelaku.

Akhirnya, laporan otopsi (autopsy report) menjadi sumber utama dalam menentukan waktu dan penyebab kematian, jenis luka, serta kemungkinan adanya kekerasan seksual atau penggunaan zat kimia. Hasil otopsi memungkinkan profiler menilai apakah kematian berlangsung cepat atau disertai penyiksaan, serta apakah ada indikasi pengaruh emosi seperti kemarahan atau kebencian pribadi. Misalnya, luka tusuk berulang di area wajah sering kali menunjukkan kemarahan personal, sementara satu luka fatal di dada bisa menandakan tindakan yang lebih terencana dan efisien.

Semua informasi ini baik yang bersifat fisik maupun psikologis, tidak berdiri sendiri. Seorang profiler harus menenun setiap potongan data menjadi satu narasi yang utuh tentang bagaimana kejahatan terjadi. Misalnya, dalam sebuah kasus di mana korban ditemukan tanpa tanda masuk paksa, pisau dapur menjadi senjata, dan tubuh berada di ruang makan setelah makan malam, profiler dapat berhipotesis bahwa pelaku adalah seseorang yang dikenal baik oleh korban, mungkin hadir di rumah atas undangan, dan melakukan serangan spontan setelah interaksi emosional tertentu. Dengan demikian, tahap Input bukan sekadar pencatatan fakta, tetapi proses awal dalam memahami hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku kriminal yang akan dibangun lebih lanjut dalam tahapan analisis berikutnya.

The Organized Crime Scene

Organized crime scene mencerminkan tindakan pelaku yang terencana dengan baik, sistematis, dan penuh perhitungan. Pelaku jenis ini biasanya memiliki kecerdasan rata-rata hingga di atas rata-rata, sosial yang cukup baik, dan mampu berinteraksi secara normal di masyarakat. TKP menunjukkan sedikit jejak fisik karena pelaku berusaha menghapus bukti: tidak ada sidik jari, senjata dibawa pergi, dan tubuh korban bisa dipindahkan ke lokasi lain. Posisi tubuh korban, kondisi ruangan, dan urutan kejadian mencerminkan kontrol dan dominasi pelaku. Misalnya,

dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ted Bundy, setiap serangan menunjukkan pola perencanaan matang, korban dipilih berdasarkan tipe tertentu, dan pelaku berusaha menyembunyikan keterlibatannya dengan cermat. Profil pelaku semacam ini sering kali menggambarkan seseorang yang perfeksionis, manipulatif, dan memiliki kebutuhan psikologis untuk mempertahankan kendali atas situasi dan korban.



Gambar 16. Ilustrasi Crime Scene

Sumber:

<https://www.l-tron.com/How-to-document-a-crime-scene>

The Disorganized Crime Scene

TKP tampak tidak beraturan, terdapat banyak bukti fisik seperti sidik jari, darah, atau senjata yang tertinggal. Pelaku biasanya bertindak secara spontan, tanpa rencana matang, dipicu oleh dorongan emosional yang intens seperti kemarahan atau ketakutan. Kondisi ini sering kali ditemukan pada pelaku dengan tingkat kecerdasan rendah, kesulitan sosial, atau gangguan mental tertentu. Misalnya, pada kasus pembunuhan impulsif akibat pertengkaran atau ledakan emosi mendadak, pelaku bertindak tanpa berpikir panjang dan sering kali tertangkap dengan cepat karena meninggalkan banyak bukti di TKP. Dengan demikian, perbedaan antara organized dan disorganized crime scene membantu profiler dalam memahami modus operandi, tingkat kendali diri, serta kondisi psikologis pelaku.



Gambar 17. Ilustrasi The Disorganized Crime Scene

Sumber:

https://www.researchgate.net/figure/Crime-scene-Note-the-existing-disorder-and-the-multiple-bloodstains-on-the-walls-and_fig1_355809448

Tahap 2 Decision Process Models

Langkah pertama dalam proses ini adalah pengelompokan kejahatan berdasarkan tipologi. Profiler mengklasifikasikan kasus ke dalam kategori tertentu, seperti kejahatan kekerasan (misalnya pembunuhan, pemerkosaan, penyerangan), kejahatan narkoba, white-collar crime (kejahatan finansial yang melibatkan penipuan atau manipulasi sistem), terorisme, atau kejahatan dengan motivasi psikologis tertentu seperti sadistic crime atau revenge crime. Setiap jenis kejahatan memiliki pola perilaku dan dinamika psikologis yang berbeda, sehingga pengelompokan ini membantu profiler memahami konteks tindakan pelaku secara lebih mendalam.

Selanjutnya, profiler berusaha menentukan motif di balik tindakan kejahatan tersebut. Motif bisa bersifat instrumental (dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti uang, kekuasaan, atau kendali), atau ekspresif (dilakukan karena dorongan emosi, seperti marah, cemburu, atau dendam). Misalnya, dalam kasus pembunuhan berencana untuk memperoleh warisan, motifnya bersifat instrumental; sedangkan pembunuhan karena kemarahan spontan termasuk ekspresif. Memahami

motif ini membantu profiler menelusuri kondisi emosional, kepribadian, serta kebutuhan psikologis pelaku.

Langkah berikutnya adalah menilai tingkat risiko korban (*victim risk assessment*). Korban dengan gaya hidup berisiko tinggi—misalnya sering keluar malam, bekerja di tempat sepi, atau terlibat aktivitas ilegal—lebih mungkin menjadi target kejahatan oportunistik. Sebaliknya, korban dengan risiko rendah—seperti anak kecil, orang tua, atau warga biasa di lingkungan aman—biasanya menjadi korban dari pelaku yang memiliki rencana matang dan motivasi psikologis yang lebih kompleks. Analisis ini tidak hanya membantu memahami dinamika interaksi antara pelaku dan korban, tetapi juga mengarahkan profiler pada tipe pelaku yang mungkin terlibat.

Dengan demikian, tahap *decision-making process* merupakan proses penyusunan logika kriminal yaitu mengubah data empiris dari TKP menjadi gambaran konseptual tentang siapa pelaku, apa motifnya, dan mengapa ia bertindak demikian. Di sinilah keterampilan berpikir analitis dan pemahaman psikologis seorang profiler benar-benar diuji.

Tahap 3 Crime Assessment

Crime assessment adalah tahap analisis dalam proses *criminal profiling* di mana penyidik atau profiler menilai dan menafsirkan pola perilaku pelaku/tersangka berdasarkan bukti yang ditemukan di **Tempat Kejadian Perkara (TKP)**. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi bagaimana kejahatan terjadi, apa motif di baliknya, dan apa makna psikologis dari tindakan pelaku.

Terdapat komponen utama dalam *crime assessment* yaitu :

1. Motivasi di balik kejahatan

Motivasi ini berupa alasan internal atau eksternal yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal (apa yang ingin dicapai pelaku). Kategori dari motivasi ini adalah:

- a. *power/control* (mendominasi, mengendalikan, atau menunjukkan kekuasaan atas korban)
- b. *anger/retaliation* (emosi negatif, misalnya kebencian atau dendam terhadap korban)
- c. *sexual gratification* (memperoleh kepuasan seksual atau memuaskan fantasi sadistik)
- d. *financial gain* (mendapatkan uang, barang, atau keuntungan materi)
- e. *ideological/political* (ideologi, agama, atau keyakinan politik sehingga kejahatan sebagai misi atau pembenaran perilaku untuk tujuan tertentu)
- f. *thrill-seeking* (mencari sensasi, ketegangan, atau kesenangan dari risiko dan kekerasan)
- g. *utilitarian* (kejahatan untuk tujuan praktis tertentu bukan karena emosi atau kesenangan, misalnya menghilangkan bukti, menghindari hukuman, dll).



Gambar 18. Ilustrasi Motif Kejahatan Financial Gain

Sumber:

<https://news.detik.com/berita/d-6510557/6-fakta-pelaku-pembunuhan-anak-di-makassar-yang-hendak-jual-organ-korban>

Indikator di TKP / investigasi:

- Barang yang diambil / tidak diambil (jika motif materi → barang hilang).
- Tingkat kekerasan dan lokasi luka (motivasi emosi/amarah cenderung luka yang bersifat personal dan berlebihan).
- Ritual atau pesan yang ditinggalkan (motivasi ideologis/psikoseksual).
- Targeting korban (jika korban dipilih spesifik → motif personal/retaliation/ideologis).

Contoh: korban dipilih karena pernah menolak pelaku → kemungkinan motivasi: retaliation/anger.

Memahami motivasi membantu mengarahkan daftar saksi, mencari pola hubungan pelaku–korban, dan memilih strategi interogasi (mis. pelaku yang termotivasi oleh shame/anger merespon berbeda dibanding pelaku yang motifnya berkaitan dengan faktor uang/ekonomi).

2. Tindakan terencana (*premediated*) atau impulsif

Hal penting untuk mengetahui apakah tindakan dilaksanakan atas dasar perencanaan yang disadari (*premediated*) atau sebagai reaksi emosional mendadak (impulsif).

Berikut adalah ciri-ciri untuk menentukan tindakan termasuk *premediated* atau impulsif:

Tabel 3. Premeditated vs Impulsif

Ciri-ciri Premeditated	Ciri-ciri Impulsif
Alat/benda untuk melakukan kejahatan dibawa atau disiapkan	Banyak bukti tak terencana di TKP (sidik, darah tercecer).
Pemilihan lokasi & waktu yang meminimalkan saksi	Kekerasan berlebihan, tanda emosi eksplosif.
Upaya menghilangkan bukti (membersihkan, membakar, menyembunyikan tubuh).	Alat yang digunakan mungkin barang di sekitar (pisau dapur, benda tumpul).
Pelaku tampak tenang, terorganisir, terampil.	Pelaku melarikan diri panik atau bertindak tak rasional.

3. Modus Operandi (MO) — Metode Operasi

Modus operandi adalah cara praktis yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuan kejahatan (bagaimana ia melakukannya). Modus operandi bersifat fungsional dan dapat berubah (belajar/beradaptasi). Berikut adalah elemen modus operandi yang dianalisis :

- Cara mendekati korban (tipu daya, paksaan, mengikuti)
- Alat/senjata yang dipakai
- Teknik kontrol (ikatan, ancaman verbal, obat).
- Cara melarikan diri / pengalihan jejak.
- Pola waktu (jam, hari, musim)

Modus operandi menggambarkan tingkat kompetensi teknis, perencanaan, dan pengalaman kriminal pelaku. Contohnya: pelaku selalu memasuki rumah lewat jendela lantai dua dan mematikan gendek dulu, di mana ini menunjukkan adanya modus operandi spesifik yang dapat menghubungkan beberapa TKP.

4. *Signature*

Signature merupakan tindakan tambahan yang bukan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan praktis kejahatan tetapi mencerminkan kebutuhan psikologis pelaku (kepuasan emosional/kompensasi). *Signature* cenderung stabil dan sulit diubah karena berakar pada motivasi/kepribadian. Perbedaan modus operandi dan *signature* adalah terletak pada modus operandi berkaitan dengan fungsi mencapai tujuan/efisiensi (“bagaimana”) sedangkan *signature* berkaitan dengan fungsi psikologis dalam memuaskan fantasi atau menandai TKP (“mengapa”). Contoh dari *signature* adalah meninggalkan benda tertentu di tubuh korban, memposisikan jenazah dalam pose ritual, meninggalkan pesan simbolik, dan lainnya.

Crime Scene Signature

Crime scene signature merupakan manifestasi fisik *signature* pada TKP, seperti pola yang konsisten dan khas di antara TKP yang berbeda. Berikut adalah indikator di TKP, yaitu:

- Elemen yang tampak “ritualistik” (simbol, kata, pose).
- Tingkat mutilasi tertentu yang bukan bagian dari tujuan (mis. untuk menghilangkan identitas) melainkan untuk ekspresi.
- Pilihan korban yang sangat spesifik (mis. tipe pakaian, ciri fisik, usia, dll).

Signature penting untuk membantu menghubungkan kasus yang dilakukan oleh pelaku sama, bahkan bila modus operandi sedikit berbeda. *Signature* juga memberi petunjuk yang kuat tentang kebutuhan psikologis/aksi fantasi pelaku.

Psychological Signature

Psychological signature merupakan inferensi tentang kebutuhan, fantasi, dan struktur emosional pelaku yang dapat ditarik dari *signature* dan pola perilaku (lebih abstrak daripada *crime scene signature*). Berikut adalah komponen yang dapat diinterpretasi, yaitu:

- Fantasi seksual / kekuatan (jika ada mutilasi atau pose seksual).
- Rasa superioritas / dominasi (jika korban dipermalukan).
- Kebencian / dendam (jika sangat menyasar bagian tubuh tertentu atau meninggalkan pesan).
- Kesenangan dari kontrol (jika ada interaksi verbal yang memancing ketakutan korban).

Hal-hal tersebut dapat digali dari gabungan observasi TKP, analisis luka, rekonstruksi urutan kejadian, dan data kontekstual (riwayat korban, hubungan korban–pelaku jika ada).

Tahap 4 Criminal Profile

Tahap ini merupakan hasil sintesis akhir dari seluruh analisis sebelumnya (data, klasifikasi, dan *crime assessment*).

Tujuannya adalah menyusun deskripsi menyeluruh tentang karakteristik pelaku, baik dari aspek demografis, psikologis, maupun perilaku, untuk membantu penyidik menyempitkan daftar tersangka dan menentukan strategi interogasi.

Sebuah *criminal profile* biasanya berisi estimasi tentang:

Tabel 4. Informasi Criminal Profile

Aspek	Deskripsi Umum	Sumber Inferensi
Ras/Etnisitas	Berdasarkan konteks wilayah, pola komunikasi, atau budaya khas di TKP.	Pola bahasa, simbol, jenis korban, lokasi TKP.
Jenis Kelamin	Ditentukan dari kekuatan fisik yang dibutuhkan, jenis luka, atau pola kekerasan.	Luka pada korban, senjata, cara menyerang.
Ciri Fisik	Perkiraan usia, tinggi, kekuatan fisik, atau cedera yang mungkin terjadi saat kejahatan.	Jejak kaki, sudut luka, DNA, atau ukuran barang.
Kebiasaan	Pola aktivitas, jam aktif, konsumsi alkohol/narkoba, gaya berpakaian.	Waktu kejadian, barang pribadi yang tertinggal, tanda di TKP.
Nilai & Keyakinan	Pandangan hidup, ideologi, moralitas, atau sistem kepercayaan yang memengaruhi perilaku kriminal.	Simbol atau pesan di TKP, pilihan korban, ritualistik behavior.

Profil ini bukan “identitas” pelaku, melainkan gambaran probabilistik tentang siapa yang paling mungkin melakukan kejahatan tersebut.

Berikut adalah perbandingan antara tahap-tahap dan rekonstruksi TKP, yaitu:

Tabel 5. Perbandingan Tahap-Tahap dan Rekonstruksi TKP

Aspek	Tahap 2 Decision-Making Model	Tahap 3 Crime Assessment	Tahap 4 Criminal Profile
Fokus Utama	Analisis logis awal untuk memahami bagaimana pelaku mengambil keputusan selama kejahatan.	Analisis mendalam terhadap motivasi, rencana, dan modus operandi.	Sintesis akhir: siapa pelakunya, seperti apa karakter dan gaya hidupnya.
Pertanyaan Kunci	Mengapa pelaku memilih cara itu? — menilai pola pikir dan rasionalitas pelaku saat bertindak.	Apa yang pelaku rasakan dan cari melalui kejahatan? — menilai emosi dan kebutuhan psikologis.	Siapa pelaku ini? — menyimpulkan profil demografis dan psikologisnya
Data yang Digunakan	Bukti objektif awal (jejak, waktu, alat, lokasi).	Integrasi bukti fisik dan interpretasi psikologis.	Semua hasil analisis sebelumnya, plus inferensi nilai, gaya hidup, dan keyakinan.
Hasil Akhir	Model pengambilan keputusan (planned vs impulsive, rational vs emotional).	Narasi perilaku dan motivasi pelaku.	Deskripsi demografis dan psikologis lengkap pelaku.

Rekonstruksi TKP (*Crime Scene Reconstruction*) adalah fondasi utama bagi *crime assessment* dan *profiling* karena di situlah :

- Terlihat urutan kejadian dan perilaku pelaku.
- Dapat diidentifikasi jejak emosi dan kontrol diri pelaku.
- Memberi konteks pada *modus operandi* dan *signature*.

Tahap 4 (Profil) dibangun di atas hasil rekonstruksi TKP:

- Rekonstruksi menjawab apa yang terjadi dan bagaimana.
- Profil menjawab siapa yang kemungkinan melakukannya dan mengapa.

Contoh hubungan:

Jika rekonstruksi TKP menunjukkan tindakan sistematis, bersih, dan rapi maka profil cenderung *organized offender* yaitu digambarkan sebagai sosok dengan usia 25–45 tahun; berpendidikan; memiliki pekerjaan tetap; secara sosial memiliki adaptasi dan kontrol emosi yang baik. Sebaliknya, TKP kacau, spontan, dan terlihat emosional maka profilnya cenderung *disorganized offender* yaitu digambarkan sebagai sosok yang impulsif; kesulitan bersosialisasi; lokasi tempat tinggal cenderung dekat dengan korban; serta cenderung merasa kesepian.

Tahap 5 Investigasi

Tahap investigasi merupakan fase penerapan (aplikasi) dari seluruh hasil analisis *criminal profiling*. Tahap ini dimulai setelah penyidik menyerahkan laporan tertulis (*written report*) yang berisi *criminal profile* kepada tim penyidik. Tujuannya bukan sekadar menyusun teori tentang pelaku, tetapi menguji dan memverifikasi profil tersebut di lapangan melalui kegiatan penyidikan yang sistematis. Berikut adalah beberapa tujuan dari tahap investigasi, yaitu :

1. **Mencocokkan hasil profil dengan tersangka yang potensial.** Tim penyidik mencari individu yang memiliki karakteristik sesuai dengan profil pelaku.
2. **Menguji validitas profil.** Penyidik memeriksa apakah deskripsi demografis, perilaku, dan kepribadian/psikologis dari pelaku sesuai dengan data yang diberikan oleh tersangka.
3. **Mengarahkan strategi investigatif.** Profil tersangka membantu menentukan wilayah pencarian, pola interogasi, dan bukti-bukti yang diprioritaskan.

4. **Berhubungan dengan kasus lain yang relevan.** Profil digunakan untuk mendeteksi pola kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama (*linkage analysis*).

Langkah-langkah dalam tahap investigasi, yaitu :

1. Review laporan profil
Penyidik menelaah laporan dari profiler (termasuk motivasi, modus operandi, signature, demografi, dan prediksi perilaku).
2. Pencarian tersangka yang potensial
Menggunakan database kriminal, catatan kepolisian, saksi, serta laporan masyarakat.
3. Evaluasi dan perbandingan
Setiap tersangka dievaluasi: apakah pola perilaku, riwayat, dan kebiasaannya cocok dengan hasil profil.
4. Pengumpulan bukti tambahan
Pemeriksaan forensik lanjutan, wawancara saksi, dan penelusuran digital.
5. Strategi interogasi berdasarkan profil
Pendekatan interogasi disesuaikan dengan tipe kepribadian pelaku (*organized vs disorganized; dominant vs emotional*).
6. Evaluasi hasil investigasi
Menilai sejauh mana profil membantu proses penyidikan.

Tahap 6 Apprehension (Penangkapan)

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses *criminal profiling*, yaitu ketika pelaku yang sesuai dengan profil telah ditemukan, diamankan, dan diinterogasi oleh penyidik. Tujuannya adalah untuk memverifikasi akurasi profil yang telah dibuat, sekaligus mengumpulkan pengakuan, motif sebenarnya, dan pola psikologis pelaku secara langsung.

Langkah-langkah dalam *apprehension*, yaitu :

1. *Apprehend* (menangkap)
Penangkapan dilakukan terhadap individu yang paling cocok dengan profil hasil investigasi.
2. *Interview* (wawancara awal)
Dilakukan secara non-konfrontatif, bertujuan untuk membangun *rapport* (hubungan awal) dan mengobservasi respons verbal/non-verbal pelaku.
3. Interogasi
Digunakan ketika pelaku sudah menjadi tersangka kuat. Pertanyaan lebih terarah untuk menguji alibi, niat, dan detail kejahatan.
4. *Arrest* (Penetapan dan Penahanan)
Jika bukti cukup kuat, penyidik melakukan penahanan resmi dan proses hukum.

4.3 Rangkuman

Criminal profiling merupakan proses untuk mengidentifikasi karakteristik psikologis, perilaku, dan sosial pelaku kejahatan berdasarkan bukti di TKP. Profiler menganalisis pola tindakan, pemilihan korban, modus operandi, serta signature (jejak emosional yang mencerminkan kebutuhan psikologis pelaku). Selain itu, victimology membantu memahami mengapa korban dipilih dan bagaimana dinamika pelaku–korban terbentuk. Proses profiling dilakukan melalui enam tahap: pengumpulan data, kategorisasi informasi, rekonstruksi kejahatan, penyusunan profil pelaku, penerapan profil dalam investigasi, dan verifikasi setelah penangkapan.

4.4 Bahan Diskusi

1. Apa perbedaan fungsional antara *modus operandi* (MO) dan *signature*?
2. Jelaskan contoh perilaku yang tampak serupa tetapi termasuk MO vs signature, dan dampaknya pada penyelidikan?

3. Bagaimana *victimology* membantu menafsirkan motivasi pelaku dan memilih hipotesis profil awal?
4. Sebutkan tiga indikator TKP paling kuat untuk membedakan premeditated vs impulsive!
5. Dalam kondisi bukti terbatas, mana yang lebih Anda prioritaskan: rekonstruksi alur keputusan pelaku atau estimasi karakteristik demografinya? Mengapa?

4.5 Feedback

1. *Modus operandi (MO)* merujuk pada cara atau metode yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan agar tindakannya berhasil dan menghindari penangkapan. MO bersifat instrumental dan dapat berubah seiring pengalaman pelaku. *Signature* dipahami sebagai perilaku khas yang mencerminkan kebutuhan psikologis atau ekspresi personal pelaku. Signature bersifat lebih stabil dan konsisten, karena berkaitan dengan motif atau fantasi internal pelaku. Diskusi menunjukkan bahwa membedakan kedua konsep ini penting untuk membantu penyidik dalam menghubungkan kasus-kasus yang mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama.
2. Terdapat contoh bahwa penggunaan alat tertentu, seperti sarung tangan untuk menghindari sidik jari, termasuk MO karena berfungsi untuk menghindari identifikasi. Sebaliknya, tindakan seperti meninggalkan simbol tertentu di lokasi kejadian atau melakukan ritual tertentu terhadap korban lebih mengarah pada signature, karena tidak diperlukan untuk keberhasilan kejahatan tetapi mencerminkan kebutuhan psikologis pelaku. Diskusi menunjukkan bahwa kesalahan dalam membedakan keduanya dapat berdampak pada kesalahan dalam menghubungkan pola kejahatan atau membangun profil pelaku.
3. *Victimology* membantu penyidik memahami karakteristik korban, seperti gaya hidup, aktivitas sehari-hari, relasi sosial, serta tingkat kerentanan korban. Informasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi alasan pemilihan korban oleh pelaku, apakah korban

dipilih secara acak, oportunistik, atau karena karakteristik tertentu. Dengan memahami korban, penyidik dapat mengembangkan hipotesis awal mengenai motivasi pelaku serta kemungkinan hubungan antara pelaku dan korban.

4. Indikator yang sering muncul dalam diskusi antara lain: persiapan alat atau metode tertentu sebelum kejadian; upaya menghilangkan jejak atau bukti setelah kejadian; pola tindakan yang sistematis atau terstruktur di lokasi kejadian. Sebaliknya, tindakan impulsif biasanya ditandai dengan kekacauan TKP, kurangnya perencanaan, serta penggunaan alat yang tersedia secara spontan.
5. Rekonstruksi alur keputusan pelaku lebih penting karena dapat membantu memahami proses berpikir pelaku selama kejadian. Rekonstruksi tersebut dapat memberikan gambaran mengenai motivasi, tingkat perencanaan, dan pola tindakan pelaku, yang kemudian dapat membantu mempersempit kemungkinan karakteristik pelaku. Namun beberapa mahasiswa juga menilai bahwa estimasi karakteristik demografis dapat membantu penyidik mempersempit cakupan pencarian, meskipun pendekatan ini memiliki risiko bias jika tidak didukung bukti yang kuat.

4.6 Refleksi

1. Diskusi menunjukkan bahwa memahami kejahatan tidak hanya bergantung pada bukti fisik, tetapi juga pada interpretasi perilaku pelaku dan konteks psikologis di balik tindakan tersebut.
2. Perbedaan antara *MO* dan *signature* menunjukkan bahwa perilaku yang tampak serupa dapat memiliki makna yang berbeda. Oleh karena itu, analisis harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.
3. Memahami karakteristik korban dapat memberikan petunjuk penting mengenai pola pemilihan target oleh pelaku serta membantu menyusun hipotesis awal dalam penyelidikan.

4. Indikator di lokasi kejadian dapat memberikan gambaran apakah tindakan dilakukan secara terencana atau impulsif, sehingga membantu penyelidik memahami dinamika kejadian.
5. Dalam situasi dengan bukti terbatas, penyelidik perlu mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara sistematis dan menghindari kesimpulan yang terlalu cepat.
6. Mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep-konsep seperti *MO*, *signature*, *victimology*, dan analisis TKP untuk memahami perilaku kriminal secara lebih komprehensif dan aplikatif dalam konteks investigasi.

4.7 Asesmen: Laporan Studi Kasus dan Video Penjelasan

Bagian 1: Kasus

- Deskripsikan kronologi kasus secara rinci.
- Silahkan mengambil dari berbagai sumber (referensi boleh berasal dari artikel berita di internet atau media lainnya namun bukan dari referensi berupa blogspot)

Bagian 2: Tahapan Input

- Tahapan ini terdiri dari mengumpulkan bukti-bukti dari TKP sesuai dengan hasil penelusuran kasus (misalnya: posisi tubuh korban, barang-barang yang ada di sekitar TKP, dll), menggali histori/ latar belakang dari korban maupun pelaku, serta menggali keterangan dari ahli (misalnya: keterangan dokter, psikolog, dan sebagainya).
- Jelaskan secara rinci dan komprehensif

Bagian 3: Tahapan Decision Process Model

- Tahapan ini terdiri dari pengelompokan kejahatan (misalnya: termasuk ke jenis kejahatan apa, bentuk kejahatan, dsbnya); menentukan motif pelaku sesuai dengan hasil penelusuran kasus; menentukan tingkat risiko korban berdasarkan teori viktimologi (misalnya: tipe/jenis korban apa, dampak yang dialami korban, kategori risiko yang dialami, dsbnya).
- Jelaskan secara rinci dan komprehensif

Bagian 4: Tahapan Crime Assessment

- Tahapan ini terdiri dari menentukan motivasi/ tujuan kejahatan di balik kasus yang dibahas kelompok (apakah kasus sudah terencana/ tidak/ impulsif).
- Jelaskan secara rinci dan komprehensif

Bagian 5: Tahapan Criminal Profile

- Tahapan ini terdiri dari: jelaskan secara rinci dan komprehensif mengenai *profile criminal*/ tersangka (misalnya: ras, jenis kelamin, ciri-ciri fisik, kebiasaan, nilai dan kepercayaan yang dimiliki, karakteristik kepribadian, ada kecenderungan psikopat/tidak, dsbnya).

Bagian 6: Tahapan Investigation

- Bandingkan profil yang kelompok temukan di bagian 5 dengan keputusan di bagian 3 dan berikan kesimpulan

Bagian 7: Tahapan Apprehension

- Buatlah guideline interview/ pertanyaan untuk melakukan wawancara investigasi terhadap tersangka.

Referensi

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2019). *Criminal behavior: A psychological approach (11th ed.)*. Pearson.

Charles L. Yeschke. (2003). *The Art of Investigating Interview*. Elsevier.

Curt R. Bartol & Anne M. Bartol. (2017). *Criminal Behavior: A Psychological Approach*. Pearson Education.

Ronald Roesch, Patricia A. Zapf, & Stephen D. Hart. (2010). *Forensic Psychology and Law*. USA: John Wiley & Sons.

4.8 Rubrik

Kriteria	Bobot	45-54.99	55-69.99	Mastery 70-84.99	85-100
Akurasi analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Relevansi kasus dengan teori • Ketepatan penggunaan teori • Keluasan teori yang digunakan • Referensi diformat sesuai dengan pedoman penulisan APA 	30%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2–3 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria.	Memenuhi 4 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kedalaman analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborasi analisis kasus dengan teori • Kekuatan argumen • Kejelasan argumen dengan kasus yang dibahas 	30%	Hanya memenuhi 1 kriteria.	Hanya memenuhi 2 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria.	Memenuhi 3 kriteria dan ada kesimpulan/benang merah yang komprehensif.
Kontribusi individu dalam kelompok	20%	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.	Sesuai peer assessment.
Kreativitas	20%	Desain tidak menarik, dan penyampaian tidak jelas.	Desain kurang menarik, tetapi informasi disampaikan dengan jelas.	Desain cukup menarik, dan informasi disampaikan dengan jelas.	Desain sangat menarik, kreatif, dan informasi disampaikan dengan sangat jelas.

Profil Penulis



■ **Dr. Stefani Virlia, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** merupakan psikolog klinis yang sering menangani kasus-kasus psikologis terkait dengan isu kesehatan mental pada keluarga. Selain menjadi psikolog profesional, beliau juga menjabat sebagai koordinator Mental Health Center dan berprofesi sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Selain memberikan konseling, ia juga aktif berperan sebagai narasumber dalam acara seminar, workshop, talkshow radio, pelatihan, hingga penelitian yang terkait dengan kesehatan mental, perkembangan anak dan remaja, pengembangan keluarga, dan edukasi seksual.



■ **Jessica Christina Widhigdo, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** merupakan dosen di *School of Psychology* Universitas Ciputra Surabaya. Ia adalah seorang profesional di bidang kesehatan mental yang berdedikasi tinggi untuk membantu remaja dan keluarga mencapai kesejahteraan mental dan emosional. Ia memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai gangguan mental, termasuk stress, kecemasan, dan depresi. Ia meyakini bahwa kesehatan fisik, emosional, spiritual, dan sosial saling terhubung, dan ia aktif mengintegrasikan pendekatan ini dalam praktik klinisnya. Ia meyakini bahwa sehat mental mampu menciptakan keseimbangan holistik dalam kehidupan. Ia juga senang berbagi pengetahuannya melalui seminar, webinar, radio dan tulisan di berbagai platform.



■ **Cita Tri Kusuma, S.Psi., M.Psi., Psikolog.** merupakan psikolog industri dan organisasi yang aktif dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen stres, serta kesehatan mental di dunia kerja dan pendidikan tinggi. Ia dikenal sebagai akademisi yang mengintegrasikan pendekatan ilmiah, praktik profesional, dan inovasi pembelajaran dalam setiap perannya. Selain menjalankan praktik psikologi, beliau berprofesi sebagai Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Ciputra Surabaya. Ia juga aktif dalam asesmen psikologis dan pengembangan modul pelatihan. Fokus profesionalnya meliputi pengembangan diri, eksplorasi karier, kesiapan kerja generasi muda, serta intervensi manajemen stres di lingkungan organisasi.

TENTANG

Buku Ini

PSIKOLOGI FORENSIK merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari penerapan prinsip, teori, dan metode psikologi dalam sistem hukum dan peradilan. Bidang ini membantu memahami perilaku manusia yang berkaitan dengan kejahatan, proses hukum, serta berbagai keputusan dalam sistem peradilan pidana.

Buku ini menyajikan konsep dasar dan penerapan psikologi forensik secara ringkas, sistematis, dan aplikatif. Pembaca akan diajak memahami berbagai topik penting seperti perilaku kriminal, asesmen psikologis dalam konteks hukum, kesaksian saksi dan korban, profil pelaku kejahatan, serta peran psikolog dalam proses penyelidikan dan persidangan.

Melalui pendekatan teoretis dan studi kasus, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual tetapi juga membantu pembaca melihat bagaimana ilmu psikologi digunakan dalam praktik hukum di dunia nyata.

Buku ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa psikologi, khususnya yang mempelajari psikologi forensik, serta bagi pembaca yang tertarik memahami hubungan antara psikologi dan sistem peradilan. Dengan bahasa yang jelas dan terstruktur, buku ini diharapkan dapat menjadi pengantar yang komprehensif dalam memahami psikologi forensik.



**PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA**